

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan**



Oleh:

Nama : Mhd. Rizky Syahputra
NPM : 1905180052
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MHD. RIZKY SYAHPUTRA
NPM : 1905180052
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH
Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIANTY, S.E., M.Si)

Pembimbing

(SRI ENDANG RAHAYU, SE., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADI GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MHD. RIZKY SYAHPUTRA
N.P.M : 1905180052
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. DURUNG NO. 80 MEDAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi

SRI ENDANG RAHAYU, SE., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Mhd. Rizky Syahputra
N.P.M : 1905180052
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat Rumah : Jl. Durung No. 80 Medan
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh.

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
5/8/2023	Perbaiki proposal	/	
	- Rumusan masalah		
	- teori - teori		
	- Data ditambah menjadi 20 Thn		
12/8/2023	- Perbaiki data	/	
	- Perbaiki model regresi		
	- Perbaiki analisis delta		
1/9/2023	- Tambahkan artikel * dari jurnal	/	
6/9/2023	Ace skripsi	/	

Pembimbing Skripsi

SRI ENDANG RAHAYU, SE., M.Si.

Medan, September 2023

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mhd. Rizky Syahputra

NPM : 1905180052

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh.**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.



Mhd. Rizky Syahputra

ABSTRAK
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di
Provinsi Aceh

MHD. RIZKY SYAHPUTRA

1905180052

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: riskysyahputra2002@gmail.com

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dan akan terus menjadi masalah nyata dari waktu ke waktu. Kemiskinan adalah fenomena, fakta yang belum dan tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Meski tak pernah bisa dihapus, kemiskinan bukan berarti harus dilupakan. Karena kemiskinan dikatakan bisa memicu segala macam kejahatan sosial, dan itu tidak baik. Provinsi Aceh termasuk wilayah dengan kemiskinan cukup tinggi pada tahun 2022 sebesar 14,64 persen, tertinggi pertama di Pulau Sumatera.

Penelitian ini menganalisis secara deskriptif mengenai indikator kemiskinan seperti persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Penelitian ini juga menganalisis sejauh mana faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, faktor tersebut yaitu jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi (UMP), dan inflasi. Metode yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda pada model ini menggunakan E-Views 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kemiskinan Provinsi Aceh yaitu pada persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan pada tahun 2003-2022, indeks kedalaman kemiskinan mengalami tren berfluktuasi naik dan turunnya pada tahun-tahun tertentu, dan indeks keparahan kemiskinan mengalami tren penurunan pada tahun 2003-2022 walaupun ada peningkatan di tahun-tahun

tertentu. Pada analisis regresi linier berganda, didapatkan Uji-t dengan $\alpha = 5\%$, menunjukkan variabel independen yaitu Jumlah Penduduk, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil Uji-F dengan $\alpha = 5\%$, menunjukkan variabel Jumlah Penduduk, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Inflasi.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi umat dari alam Jahiliyah kearah kehidupan yang penuh petunjuk, sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH”. yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari semua pihak. Penulis menyampaikan ucapan hormat dan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izin Nya Yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda M Idham Parinduri, S.E dan ibunda Rosdeni Lubis yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada

penulis semenjak kecil. Terima kasih atas motivasi, curahan kasih sayang, dukungan, pengorbanan materil, dan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan kelak bisa menjadi orang yang sukses.

3. Untuk kakak saya, Atika Putri, S.Pd. Dan seluruh keluarga besar yang selama ini selalu memberikan penulis semangat yang tiada hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Sri Endang Rahayu, SE., M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dan juga memberikan bimbingan/arahan/kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
9. Kepada Bapak/Ibu Dosen Ekonomi Pembangunan yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Kepada Seluruh staf biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Studi ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi reynaldi, agung, reza, aisyah.
12. Teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan dengan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta menambah referensi bagi yang membutuhkan.

Medan, September 2023

Penulis

Mhd. Rizky Syahputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	19
1.3. Batasan Masalah	20
1.4. Rumusan Masalah	20
1.5. Tujuan Penelitian	21
1.6. Manfaat Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Landasan Teori	22
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	22
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	31
2.1.3 Kemiskinan	38
2.1.4 Jumlah Penduduk.....	44
2.1.5 Pengangguran.....	47

2.1.6 Upah.....	52
2.1.7. Inflasi.	56
2.2. Penelitian Terdahulu.....	64
2.3. Kerangka Penelitian.	66
2.4. Hipotesis	67
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1. Pendekatan Penelitian	68
3.2. Defenisi Operasional.....	68
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	69
3.3.1. Tempat Penelitian.....	69
3.3.2. Waktu Penelitian	69
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	70
3.4.1 Jenis Data	70
3.4.2 Sumber data	70
3.5. Teknik Pengumpulan Data	70
3.6. Teknik Analisis Data	70
3.6.1 Analisis Deskriptif	70
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78
4.1 Gambaran umum tempat penelitian	78
4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Aceh.....	78

4.1.2 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Aceh.....	79
4.1.3 Perkembangan Indikator Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh...	80
4.1.4 Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh.....	84
4.1.5 Perkembangan Pengangguran di Provinsi Aceh	85
4.1.6 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Aceh	87
4.1.7 Perkembangan Inflasi Provinsi di Provinsi Aceh.....	88
4.2 Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian.....	89
4.2.1 Hasil Analisis Regresi Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Pada Tahun 2003-2022	89
4.2.2 Interpretasi Model Regresi.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	104
Daftar Pustaka.....	106
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2003-2022	5
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2003-2022	6
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2003-2022	11
Tabel 1.4 Indikator Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2003-2022	14
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh 2003 – 2022.....	15
Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh 2003-2022	16
Tabel 1.7 UMP Provinsi Aceh 2003 – 2022.....	17
Tabel 1.8 Inflasi Provinsi Aceh 2003 – 2022 (Persen).....	19
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	64
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	69
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022	79
Tabel 4.2 Indikator Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022	81
Tabel 4.3 Jumlah Peduduk di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022	84
Tabel 4.4 Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022	86
Tabel 4.5 Upah Minimum Provinsi di Aceh Tahun 2003-2022	87
Tabel 4.6 inflasi di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022	89
Tabel 4.7 Hasil Regresi Linier Berganda Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh	90

Tabel 4.8 Hasil Regresi Linier Berganda Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)	91
Tabel 4.9 Korelasi Antar Variabel Independen	92
Tabel 4.10 Uji Normalitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN).....	97
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)	98
Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN).....	98
Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN).....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wegner	34
Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman.....	36
Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapatan	37
Gambar 2.4 Kerangka Analisis Penelitian	66
Gambar 2.5 Bagan Konseptual	66
Gambar 3.1 Grafik Kriteria Uji Statistika T	74
Gambar 3.2 Grafik kriteria Pengujian Statistik F	75
Gambar 4.1 Peta wilayah Provinsi Aceh.....	78
Gambar 4.2 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel JP	94
Gambar 4.3 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel PG	94
Gambar 4.4 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel UMP.....	95
Gambar 4.5 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel INF	95
Gambar 4.6 Kurva Distribusi Uji f Pada Model Regresi	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan tujuan suatu negara, semakin tinggi tingkat pembangunan maka semakin maju negara tersebut. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengurangi kemiskinan yang ada. Pertumbuhan ekonomi adalah masalah jangka panjang yang harus dihadapi setiap negara, dan ada ekspektasi tinggi bahwa ekonomi akan tumbuh sangat pesat. Karena setiap negara memiliki tujuan yang sama, bagaimana suatu negara dapat mengakselerasi pertumbuhannya.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana output per kapita terus meningkat dalam jangka panjang (Ningsih & Andiny, 2018). Pertumbuhan ekonomi adalah alasan untuk perkembangan ekonomi suatu negara yang sehat. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan suatu bangsa. Jika suatu negara gagal meningkatkan pertumbuhannya, maka akan muncul masalah ekonomi dan sosial baru, seperti kemiskinan yang parah. Kemiskinan dapat dipandang sebagai keadaan sosial dari kelemahan ekonomi.

Ketika ekonomi berkembang di daerah-daerah yang lebih kecil di negara atau daerah tertentu, terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika didistribusikan dengan benar di antara penduduk daerah itu, akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teori, pertumbuhan ekonomi memegang

peranan penting dalam mengatasi kemiskinan. Setiap daerah sangat diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mengorbankan distribusi pendapatan untuk pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan untuk mengurangi kemiskinan kronis dan meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan tidak saling eksklusif. Pembangunan ekonomi memiliki efek negatif seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran yang harus diatasi melalui program pembangunan. Agenda pembangunan termasuk perumusan kebijakan harus melibatkan semua sektor termasuk masyarakat miskin untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat miskin bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, terutama melalui pendidikan, kesehatan, dan akses informasi.

Kemiskinan sudah ada sejak manusia ada. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dan akan terus menjadi masalah nyata dari waktu ke waktu. Kemiskinan adalah fenomena, fakta yang belum dan tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Meski tak pernah bisa dihapus, kemiskinan bukan berarti harus dilupakan. Karena kemiskinan dikatakan bisa memicu segala macam kejahatan sosial, dan itu tidak baik.

Dampak kemiskinan tidak segera diatasi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya akses pendidikan: Orang miskin tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Mereka tidak bisa mengikuti perkembangan

teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini berdampak pada rendahnya prestasi akademik dan menghambat perkembangan perekonomian nasional.

2. Kurangnya akses terhadap kesehatan: Orang miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mereka secara keseluruhan, seperti masalah gizi dan infeksi yang belum terselesaikan.
3. Tingkat kejahatan yang meningkat: Kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kejahatan di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kekerasan di masyarakat.
4. Meningkatnya tingkat Pengangguran: Kemiskinan dapat menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi di seluruh Indonesia. Ini akan membuat lebih banyak orang kehilangan pekerjaan dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.
5. Kualitas hidup yang rendah: Orang miskin memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan sosial, seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan.

Kemiskinan sering digambarkan sebagai rendahnya pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketidak mampuan seseorang untuk menghidupi dirinya sendiri karena mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup menempatkan mereka pada garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran untuk kebutuhan makan setara dengan 2.100 kalori/kapita/ hari. Garis Kemiskinan non- Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan , sandang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain

kebutuhan dasar. Sedemikian rupa sehingga kita dapat mengatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengamankan konsumsi makanan dan bukan makanan melalui pendapatan yang dimiliki. Menurut (Aprillyana, 2020) Indikator kemiskinan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Angka Kemiskinan.
2. Kedalaman Kemiskinan.
3. dan Keparahan Kemiskinan.

Istilah kemiskinan mengacu pada ketidak mampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya atau kemakmuran ekonomi berdasarkan standar hidup di suatu daerah (Guampe et al., 2022). Status kemiskinan suatu negara atau wilayah juga mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk negara tersebut (Christianto, 2013). Sejalan dengan tujuan utama SDG yang menekankan bahwa mengakhiri segala bentuk kemiskinan sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat, kemiskinan ternyata masih menghantui dan selalu menjadi masalah nasional. Kemiskinan di negara berkembang sendiri merupakan masalah yang cukup kompleks, meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan proses pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016).

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu berulang di setiap daerah atau provinsi di Indonesia maupun negara lain. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup. Pada umumnya kebutuhan hidup yang harus diperoleh seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan didasarkan pada kekurangan harta dan pendapatan.

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Lima di antaranya adalah pulau-pulau besar, yaitu pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Papua dan ribuan pulau lainnya merupakan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
2003-2022**

Penduduk Miskin Indonesia		
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2003	37,34	17,42
2004	36,15	16,66
2005	36,80	16,69
2006	39,30	17,75
2007	37,17	16,58
2008	34,96	15,42
2009	32,53	14,15
2010	31,02	13,33
2011	29,89	12,36
2012	28,59	11,66
2013	28,55	11,47
2014	27,73	10,96
2015	28,51	11,13
2016	27,76	10,70

2017	26,58	10,12
2018	25,67	9,66
2019	24,78	9,22
2020	27,55	10,19
2021	26,50	9,71
2022	26,36	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 26,36 juta orang dan persentase penduduk miskin pada 2022 sebesar 9,57%. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di indonesia meningkat sebesar 27,55 juta orang dan persentase penduduk miskin di indonesia sebesar 10,19%, Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi covid-19 yang melanda indonesia.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2003-2022

Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	29,76	28,47	28,69	28,28	26,65	23,55	21,61	19,95	19,48	18,58
Sumatera Utara	15,89	14,93	14,68	15,01	13,90	12,47	11,27	11,36	10,83	10,41
Sumatera Barat	11,24	10,46	10,89	12,51	11,90	10,57	9,45	9,44	8,99	8,00
Riau	13,52	13,12	12,51	11,85	11,20	10,79	9,45	10,01	8,17	8,05
Jambi	12,74	12,45	11,88	11,37	10,27	9,28	8,55	8,40	7,90	8,29
Sumatera Selatan	21,54	20,92	21,01	20,99	19,15	17,67	15,68	14,80	13,95	13,48
Bengkulu	22,69	22,39	22,18	23,00	22,13	19,12	18,14	16,37	17,36	17,52
Lampung	22,63	22,22	21,42	22,77	22,19	20,93	19,34	17,76	16,58	15,65
Kep. Bangka Belitung	10,06	9,07	9,74	10,91	9,54	7,89	7,37	7,51	5,16	5,36
Kepulauan Riau	-	-	10,97	12,16	10,30	8,73	7,98	8,13	6,79	6,83

DKI Jakarta	3,42	3,18	3,61	4,57	4,61	3,86	3,80	4,04	3,64	3,70
Jawa Barat	12,90	12,10	13,06	14,49	13,55	12,74	11,58	10,93	10,57	9,88
Jawa Tengah	21,78	21,11	20,49	22,19	20,43	18,99	17,48	16,11	16,21	14,98
DI Yogyakarta	19,86	19,14	18,95	19,15	18,99	18,02	16,86	15,63	16,14	15,88
Jawa Timur	20,93	20,08	19,95	21,09	19,98	18,19	16,22	14,87	13,85	13,08
Banten	9,56	8,58	8,86	9,79	9,07	8,20	7,46	7,02	6,26	5,71
Bali	7,34	6,85	6,72	7,08	6,63	5,85	4,88	5,67	4,59	3,95
Nusa Tenggara Barat	26,34	25,38	25,92	27,17	24,99	23,40	21,88	21,58	19,67	18,02
Nusa Tenggara Timur	28,63	27,86	28,19	29,34	27,51	25,68	23,41	21,76	20,48	20,41
Kalimantan Barat	14,79	13,91	14,24	15,24	12,91	10,87	9,05	9,10	8,48	7,97
Kalimantan Tengah	11,37	10,44	10,73	11,00	9,38	8,36	7,01	7,52	6,64	6,19
Kalimantan Selatan	8,16	7,19	7,23	8,32	7,01	6,21	5,44	5,65	5,35	5,02
Kalimantan Timur	12,15	11,57	10,57	11,41	11,04	8,53	7,86	8,00	6,63	6,38
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	9,01	8,94	9,34	11,54	11,42	9,80	9,32	9,59	8,46	7,63
Sulawesi Tengah	23,04	21,69	21,80	23,63	22,42	20,61	18,61	17,24	16,04	14,94
Sulawesi Selatan	15,85	14,90	14,98	14,57	14,11	13,41	11,93	11,40	10,27	9,82
Sulawesi Tenggara	22,84	21,90	21,45	23,37	21,33	19,38	17,44	15,69	14,61	13,06
Gorontalo	29,25	29,01	29,05	29,13	27,35	20,47	18,34	16,55	18,02	17,21
Sulawesi Barat	-	-	-	20,74	19,03	15,27	14,96	14,71	13,64	13,00
Maluku	32,85	32,13	32,28	33,03	31,14	29,24	27,29	25,32	22,45	20,76
Maluku Utara	13,92	12,42	13,23	12,73	11,97	11,51	10,34	9,79	10,00	8,05
Papua Barat	-	-	-	41,34	39,31	33,49	31,43	28,59	18,53	27,04
Papua	39,03	38,69	40,83	41,52	40,78	35,53	34,77	34,10	31,25	30,66

Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	17.72	16.98	17.08	16.73	16.89	15.97	15.32	14.99	15.33	14.64
Sumatera Utara	10.39	9.85	10.53	10.35	10.22	9.22	8.83	8.75	9.01	8.42
Sumatera Barat	7.56	6.89	7.31	7.09	6.87	6.65	6.42	6.28	6.63	5.92
Riau	8.42	7.99	8.42	7.98	7.78	7.39	7.08	6.82	7.12	6.78
Jambi	8.41	8.39	8.86	8.41	8.19	7.92	7.60	7.58	8.09	7.62
Sumatera Selatan	14.06	13.62	14.25	13.54	13.19	12.80	12.71	12.66	12.84	11.90
Bengkulu	17.75	17.09	17.88	17.32	16.45	15.43	15.23	15.03	15.22	14.62
Lampung	14.39	14.21	14.35	14.29	13.69	13.14	12.62	12.34	12.62	11.57
Kep. Bangka Belitung	5.25	4.97	5.40	5.22	5.20	5.25	4.62	4.53	4.90	4.45
Kepulauan Riau	6.35	6.40	6.24	5.98	6.06	6.20	5.90	5.92	6.12	6.24
DKI Jakarta	3.72	4.09	3.93	3.75	3.77	3.57	3.47	4.53	4.72	4.69
Jawa Barat	9.61	9.18	9.53	8.95	8.71	7.45	6.91	7.88	8.40	8.06
Jawa Tengah	14.44	13.58	13.58	13.27	13.01	11.32	10.80	11.41	11.79	10.93
DI Yogyakarta	15.03	14.55	14.19	13.34	13.02	12.13	11.70	12.28	12.80	11.34
Jawa Timur	12.73	12.28	12.34	12.05	11.77	10.98	10.37	11.09	11.40	10.38
Banten	5.89	5.51	5.90	5.42	5.45	5.24	5.09	5.92	6.66	6.16
Bali	4.49	4.76	4.74	4.25	4.25	4.01	3.79	3.78	4.53	4.57
Nusa Tenggara Barat	17.25	17.05	17.10	16.48	16.07	14.75	14.56	13.97	14.14	13.68
Nusa Tenggara Timur	20.24	19.60	22.61	22.19	21.85	21.35	21.09	20.90	20.99	20.05
Kalimantan Barat	8.74	8.07	8.03	7.87	7.88	7.77	7.49	7.17	7.15	6.73
Kalimantan Tengah	6.23	6.07	5.94	5.66	5.37	5.17	4.98	4.82	5.16	5.28
Kalimantan Selatan	4.76	4.81	4.99	4.85	4.73	4.54	4.55	4.38	4.83	4.49
Kalimantan Timur	6.38	6.31	6.23	6.11	6.19	6.03	5.94	6.10	6.54	6.31
Kalimantan Utara	-	-	6.24	6.23	7.22	7.09	6.63	6.80	7.36	6.77
Sulawesi Utara	8.50	8.26	8.65	8.34	8.10	7.80	7.66	7.62	7.77	7.28
Sulawesi Tengah	14.32	13.61	14.66	14.45	14.14	14.01	13.48	12.92	13.00	12.33

Sulawesi Selatan	10.32	9.54	9.39	9.40	9.38	9.06	8.69	8.72	8.78	8.63
Sulawesi Tenggara	13.73	12.77	12.90	12.88	12.81	11.63	11.24	11.00	11.66	11.17
Gorontalo	18.00	17.41	18.32	17.72	17.65	16.81	15.52	15.22	15.61	15.42
Sulawesi Barat	12.23	12.05	12.40	11.74	11.30	11.25	11.02	10.87	11.29	11.75
Maluku	19.27	18.44	19.51	19.18	18.45	18.12	17.69	17.44	17.87	15.97
Maluku Utara	7.64	7.41	6.84	6.33	6.35	6.64	6.77	6.78	6.89	6.23
Papua Barat	27.14	26.26	25.82	25.43	25.10	23.01	22.17	21.37	21.84	21.33
Papua	31.52	27.80	28.17	28.54	27.62	27.74	27.53	26.64	26.86	26.56

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan dari tabel 1.2 diatas bahwa persentase penduduk miskin tertinggi di pulau sumatera adalah Aceh dan merupakan posisi ke-4 dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia pada tahun 2022.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga pemerintah menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 dan sejalan

dengan Kesepakatan Global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mengentaskan kemiskinan pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan. Program-program tersebut meliputi:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan ekonomi langsung kepada keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- b. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan pendidikan, dukungan gizi dan jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat (PKBM). Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan dukungan ekonomi dan pendidikan, serta mendukung peluang pengembangan usaha kecil menengah (UKM).
- e. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin sebagai bentuk dukungan ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah serius bagi seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Kemiskinan menjadi masalah serius di Provinsi

Aceh. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, melibatkan banyak aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Kemiskinan yang meluas di suatu daerah seharusnya dianggap sebagai masalah serius, karena kemiskinan membuat banyak orang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan salah satu penyakit dalam perekonomian, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus demikian dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat pulau Sumatera. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa. Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh (ibu kota provinsi), Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2003-2022

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ACEH	1.254,2	1.157,2	1.166,4	1.149,7	1.083,7	962,3	885,8	898,4	900,2	880,5
Simeulue	26,7	24,3	27,1	26,9	25,1	20,6	19,1	19,0	19,0	18,6
Aceh Singkil	50,9	41,9	44,0	43,3	26,5	22,2	20,3	19,9	19,9	19,4
Aceh Selatan	49,0	51,1	52,4	47,5	49,8	38,8	35,4	32,2	32,3	31,6
Aceh Tenggara	40,5	40,0	42,5	40,3	36,3	30,9	27,9	30,1	30,2	29,5
Aceh Timur	79,9	93,5	92,8	92,2	84,9	76,2	68,3	66,6	66,7	65,4
Aceh Tengah	80,0	79,5	45,0	43,6	39,9	40,6	38,2	35,3	35,4	34,7
Aceh Barat	81,7	57,0	54,4	52,5	48,2	43,7	40,4	42,4	42,5	41,6
Aceh Besar	91,6	89,9	88,5	86,3	79,1	63,5	59,0	66,2	66,3	64,9
Pidie	200,7	165,5	173,9	168,6	120,3	101,8	93,8	90,2	90,4	88,3
Bireuen	104,9	101,5	106,3	102,9	93,0	79,1	72,9	76,1	76,3	74,8
Aceh Utara	150,7	166,7	180,4	174,5	163,2	135,7	126,6	124,4	124,7	122,2
Aceh Barat Daya	42,7	31,0	33,5	33,0	33,5	27,4	25,0	25,2	25,3	24,7
Gayo Lues	26,9	22,0	24,8	24,5	23,1	18,9	17,1	19,1	19,1	18,6
Aceh Tamiang	62,0	57,7	58,7	56,7	50,8	50,8	45,3	45,2	45,3	44,3
Nagan Raya	52,8	39,6	45,8	43,7	40,0	33,2	30,9	33,5	33,6	32,8
Aceh Jaya	29,8	24,9	19,1	18,6	19,5	17,2	17,1	15,6	15,6	14,8
Bener Meriah	-	-	31,4	30,2	28,1	31,3	28,6	32,1	32,2	31,6
Pidie Jaya	-	-	-	-	43,3	37,7	35,6	34,7	34,8	34,2
Kota Banda Aceh	26,0	21,1	15,1	14,7	14,0	19,9	17,3	20,8	20,8	20,4
Kota Sabang	8,9	8,9	8,8	8,3	7,8	7,1	6,5	6,7	6,7	6,5
Kota Langsa	22,9	20,5	21,0	19,4	19,1	24,0	21,3	22,4	22,4	21,9
Kota Lhokseumawe	25,6	20,7	25,6	22,2	19,4	23,9	22,5	24,1	24,2	23,5
Kota Subulussalam	-	-	-	-	18,7	17,7	16,8	16,5	16,5	16,1

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ACEH	856,9	837,4	851,6	848,44	872,61	839,49	819,44	814,91	834,24	806,82
Simeulue	17,8	17,5	18,1	17,93	18,40	18,22	17,67	17,34	18,25	17,86
Aceh Singkil	20,7	20,0	24,8	25,09	26,27	25,74	25,66	25,43	25,48	24,33
Aceh Selatan	29,3	28,4	29,6	30,68	32,51	32,82	31,06	30,91	32,25	30,78
Aceh Tenggara	27,8	27,1	30,1	29,39	30,84	30,20	28,93	28,98	29,31	28,42
Aceh Timur	64,4	63,0	63,5	61,63	63,67	61,64	62,79	62,34	63,69	62,16
Aceh Tengah	33,6	32,8	34,3	33,16	34,24	32,31	32,78	32,48	32,72	31,50
Aceh Barat	44,3	43,9	41,4	40,11	40,72	39,56	39,29	39,06	39,83	38,46
Aceh Besar	63,9	62,4	62,3	62,03	62,72	60,08	58,90	59,70	60,26	58,18

Pidie	85,8	83,7	88,2	90.16	92.34	89.53	86.29	86.39	88.53	85.87
Bireuen	73,9	72,2	73,1	70.44	71.54	65.74	63.60	62.42	63.02	60.29
Aceh Utara	115,4	112,7	111,4	115.05	118.74	111.27	107.34	106.41	109.49	107.02
Aceh Barat Daya	25,7	25,0	25,9	25.73	26.57	25.23	24.36	24.21	25.06	24.00
Gayo Lues	19,0	18,6	19,3	19.48	19.91	19.09	18.63	18.42	18.61	18.09
Aceh Tamiang	40,8	39,9	40,4	40.88	42.01	41.21	39.35	38.93	40.03	38.25
Nagan Raya	32,7	31,9	31,3	30.31	31.06	31.06	29.93	29.99	30.71	29.63
Aceh Jaya	14,6	14,2	13,9	13.10	13.23	12.85	12.35	12.11	12.63	12.13
Bener Meriah	30,9	30,2	29,3	29.82	29.98	29.08	28.45	28.38	28.69	27.93
Pidie Jaya	32,6	31,9	31,8	31.94	33.60	31.72	30.97	31.39	31.79	30.41
Kota Banda Aceh	19,4	19,4	19,3	18.80	19.23	19.13	19.42	18.97	20.95	19.90
Kota Sabang	5,9	5,6	5,9	5.81	5.98	5.62	5.43	5.27	5.33	5.14
Kota Langsa	20,3	19,8	19,2	18.63	19.20	18.73	18.62	18.65	19.78	19.41
Kota Lhokseumawe	23,0	22,5	23,2	23.28	24.40	23.88	23.05	22.69	23.38	23.03
Kota Subulussalam	15,0	14,6	15,3	14.99	15.44	14.78	14.56	14.46	14.46	14.06

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh

Dari Tabel 1.3 diatas tampak bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh dari tahun 2003-2022 mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh di angka tertinggi selama 20 tahun terakhir yaitu pada tahun 2005 sebesar 1.166,4 juta/jiwa, Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 terjadi ketika ada bencana alam pada 26 desember 2004. dan terendah pada tahun 2022 sebesar 806,82 ribu/jiwa. Pada tahun 2022 kemiskinan tertinggi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adalah Aceh Utara dengan jumlah penduduk miskin sebesar 107,02 ribu/jiwa. Kemiskinan kota sabang sebesar 5,14 ribu/jiwa. Dari tabel data yang diperoleh diatas kemiskinan di daerah Kabupaten jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan baik tahun 2003 hingga tahun 2022. Hal ini menandakan masih banyaknya masyarakat di Provinsi Aceh yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.4 Indikator Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2003	29,76	6,73	2,12
2004	28,47	6,32	1,98
2005	28,69	5,83	1,85
2006	28,28	5,28	1,48
2007	26,65	5,41	1,64
2008	23,55	5,18	1,55
2009	21,61	3,88	1,46
2010	19,95	3,48	0,96
2011	19,48	3,48	0,94
2012	18,58	3,07	0,83
2013	17,72	3,20	0,83
2014	16,98	3,14	0,86
2015	17,08	3,10	0,83
2016	16,73	3,48	1,00
2017	16,89	2,98	0,81
2018	15,97	2,84	0,75
2019	15,32	2,64	0,66
2020	14,99	2,72	0,71
2021	15,33	2,86	0,75
2022	14,64	2,49	0,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dari tabel di atas bahwa persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2003 persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan merupakan angka tertinggi selama 20 tahun

terakhir. Persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi meningkat di mulai tahun 2005 (setelah terjadinya bencana alam), 2015, 2017, 2021 (pendemi covid-19).

Kemiskinan Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, salah satunya adalah jumlah penduduk. Penduduk didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah pada waktu tertentu dan sebagai akibat dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Di sisi lain, populasi dapat menjadi beban atau potensi di masa depan. Akan menjadi beban jika pertumbuhan penduduk cenderung menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Sementara dikatakan potensi bahwa jika pertumbuhan penduduk dapat mendorong pembangunan ekonomi dengan menghasilkan angkatan kerja yang berpotensi meningkat sektor-sektor produksi, sehingga berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi. Sebaran penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas geografis maupun batas administrasi pemerintahan.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh 2003 – 2022

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)
2003	4.218,486
2004	4.075,599
2005	4.031,589
2006	4.153,573
2007	4.223,833
2008	4.293,915
2009	4.363,477
2010	4.523,144
2011	4.619,033
2012	4.715,108
2013	4.811,133
2014	4.906,835
2015	5.001,953

2016	5.096,248
2017	5.189,466
2018	5.281,314
2019	5.371,532
2020	5.274,871
2021	5.333,733
2022	5.407,855

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dari tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh berdasarkan sensus tahun 2022 bertambah sebanyak 5,407,855 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya sebanyak 5,333,7333 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi banyak hal, yaitu Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan mengalami peningkatan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah pengangguran. Pengangguran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang tersedia, tetapi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran mencakup semua orang yang telah mencari pekerjaan selama enam bulan atau lebih.

**Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh
2003 – 2022**

Tahun	Pengangguran (Persen)
2003	8,97
2004	9,35
2005	14,00
2006	10,43
2007	9,84
2008	9,56
2009	8,71
2010	8,37
2011	7,43

2012	9,10
2013	10,30
2014	9,02
2015	9,93
2016	7,57
2017	6,57
2018	6,34
2019	6,17
2020	6,59
2021	6,30
2022	6,17

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Jumlah Pengangguran Provinsi Aceh mengalami fluktuasi meningkat pada tahun 2004, 2005, 2012, 2013, 2015, 2020. Pada tahun 2004 Persentase Pengangguran di Aceh sebesar 9,35%, yang sebelumnya 8,97%. Dan di tahun 2005 meningkat kembali menjadi 14,00%. Di tahun 2012 meningkat kembali pengangguran sebesar 9,10% dan 2013 sebesar 10,30%. Di tahun 2015 meningkat sebesar 9,93% dan 2020 sebesar 6,59%.

Faktor lain kemiskinan, seperti Upah Minimum provinsi (UMP). Upah minimum provinsi adalah besaran upah yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah untuk setiap provinsi di Indonesia. UMP adalah upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja di provinsi tersebut. Tujuan UMP adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan upah yang layak. Dengan UMP, pekerja diharapkan memperoleh upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Tabel 1.7 UMP Provinsi Aceh 2003 – 2022

Tahun	UMP
2003	425.000
2004	550.000

2005	620.000
2006	820.000
2007	850.000
2008	1.000.000
2009	1.200.000
2010	1.300.000
2011	1.350.000
2012	1.400.000
2013	1.550.000
2014	1.750.000
2015	1.900.000
2016	2.118.500
2017	2.500.000
2018	2.700.000
2019	2.916.810
2020	3.165.031
2021	3.165.031
2022	3.166.460

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

Selain upah minimum, faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah inflasi. Dari sudut pandang ekonomi, inflasi merupakan fenomena di suatu negara dimana fluktuasi inflasi cenderung menyebabkan ketidak stabilan ekonomi. Menurut Sukirno (2011) mengungkapkan bahwa inflasi merupakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara signifikan. Inflasi terjadi karena jumlah mata uang lokal yang beredar di masyarakat terlalu tinggi, selain itu terjadinya inflasi juga menurunkan investasi atau pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Inflasi telah berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat untuk beberapa hal mendasar seperti kebutuhan pokok dan menghambat

investasi. Bila hal ini terjadi, tentu akan mendorong peningkatan angka kemiskinan di beberapa daerah.

Tabel 1.8 Inflasi Provinsi Aceh 2003 – 2022 (Persen)

Tahun	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Inflasi	4,03	7,08	34,88	9,98	9,41	11,92	3,72	5,86	3,43	0,22

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi	7,31	8,09	1,53	3,95	4,25	1,84	1,69	3,59	2,24	5,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dari tabel di atas, inflasi Provinsi Aceh mengalami fluktuasi meningkat di tahun 2004, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, dan 2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dengan munculnya fenomena perekonomian di Provinsi Aceh khususnya kemiskinan yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh berfruktusi meningkat di tahun 2005, 2010, 2011, 2015, 2017, dan 2021 (covid-19).
2. Masih banyaknya penduduk miskin di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten ketimbang di perkotaan.

3. Bertambahnya jumlah penduduk sehingga meningkatkan kemiskinan.
4. Pengangguran berfruktuasi meningkat di tahun 2004 (bencana alam), 2005, 2012, 2013, 2015, 2020 (covid-19)
5. Inflasi di Provinsi Aceh berfruktuasi meningkat di tahun 2004, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, dan 2022.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian yang akan dilakukan harus memiliki batasan masalah dan memperhatikan banyaknya masalah yang ditemukan. Oleh karena itu, pembatasan masalah dilakukan sedemikian rupa agar masalah yang diteliti lebih terarah dan tidak berkembang dari masalah aslinya tetapi kemudian dapat fokus pada masalah yang diteliti. Berikut ini adalah batasan masalah dalam penelitian ini yang menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, faktor tersebut adalah jumlah penduduk, tingkat pengangguran, upah minimum Provinsi (UMP), dan inflasi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dilihat dari indikator kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Aceh?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada yang tergambar pada latar belakang Masalah dan rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat kemiskinan Provinsi Aceh dari sisi indikator kemiskinan.
2. Untuk mengestimasi pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Aceh.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam menganalisis dampak jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi (UMP), dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan.

b. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.
2. Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000).

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita (income per capita) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (gross national income-GNI) per kapita “rill” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan seberapa banyak barang dan jasa rill yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri yang merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu aliran ekonomi yang sedang berkembang adalah sistem liberal dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peningkatan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital. Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini tergantung pada sumber daya alam. Aliran klasik juga mengalami perkembangan dari beberapa pengamat aliran klasik, diantaranya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.

1. Teori Adam Smith

Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan. Adam Smith adalah ahli Ekonomi Klasik yang paling terkemuka. Bukunya yang sangat terkenal berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* terbit tahun 1776. Ia meyakini berlakunya "doktrin hukum alam" dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang paling tahu terhadap kepentingannya sendiri sehingga sebaiknya setiap orang dibebaskan untuk mengejar

kepentingannya demi keuntungannya sendiri. Ia penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijakan pasar bebas. Pasar persaingan sempurna adalah mekanisme pencipta keseimbangan otomatis yang akan menciptakan maksimisasi kesejahteraan ekonomi.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktivitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

2. Teori David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang

subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga adanya persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

3. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses Urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengansumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

1). Perekonomian Tradisional Teori Lewis

mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten pula. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2). Perekonomian Industri Perekonomian

ini terletak di perkotaan, dimana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri-ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang

tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah dikota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada di industri tersebut.

4. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori Pattern of Development memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya manusia (human capital). (Todaro & Smith, 2011)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri (Todaro & Smith, 2011). Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan,

dimana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi diperkotaan (Todaro & Smith, 2011).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (supply) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.
2. Adanya akumulasi capital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat itu tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.

4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut teori neo-klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual, keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional, serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara - negara belum maju.

Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara, pendekatan, dan tindakan dilakukan

dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

1. Keynes

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan

mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik.

John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “The General Theory Of Employment, Interest And Money”. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrold Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana tulis Schumpeter, “ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke tanah seberang, ia akan mati di sana dan bahkan menjadi beracun

sebelum mati. Tetapi ditanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjanjikan buah dan keteduhan. Begitu juga dengan saran lain yang pernah dikemukakan Keynes. (Jhingan, M.L, 2010)

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran

pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut:

A. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu

perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPK_1} < \frac{PPkP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{PPkP_n}{PPK_n}$$

Keterangan :

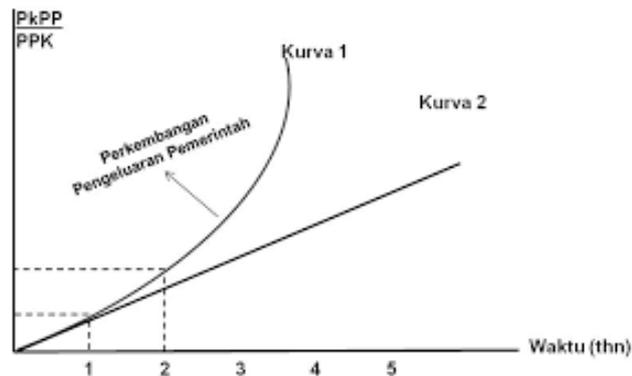
PPkP : Pengeluaran pemerintah Per kapita

PPK : Produk atau pendapatan nasional per kapita

1,2 ... n : Indeks waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. (Mangkoesebroto, 1994).

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wegner



Sumber : Mangkoesobroto, 1993.

Menurut Wagner ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Sebagaimana ditunjukan dalam gambar sebagai berikut : secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. (Mangkoesobroto, 1993).

B. Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan

pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

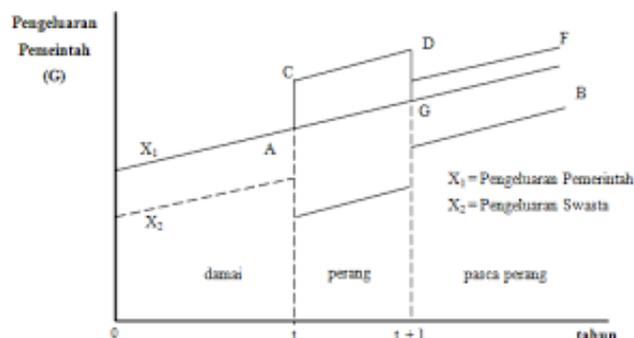
Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada satu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Jadi dalam keadaan normal, kenaikan PDB menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek pengganti (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi juga karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

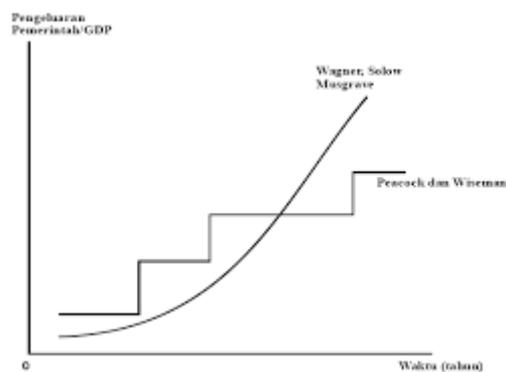
Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman



Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AP. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AB dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan segmen BC. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke P. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat



Sumber: Mangkoesubroto, 1997

Rostow Mugrave dan Peacock Wiseman, Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadi gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

2.1.3 Kemiskinan

A. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu terkendala dengan pemenuhan kebutuhan dasar jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Menurut Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, untuk mewujudkan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menurut World Bank, kemiskinan adalah keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan untuk meningkatkan kualitas hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya, standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank sebesar \$2/hari.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang baik, seperti makanan, pakaian dan tempat berlindung. Kemiskinan juga dapat menyebabkan kebodohan karena tidak adanya akses pendidikan yang mereka terima (Febriaty & Nurwani, 2018).

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, akan terus menjadi persoalan yang aktual dari masa ke masa. Walaupun sampai sekarang ini belum ditemukan rumusan atau formulasi penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdaya guna, signifikan dan relevan menurut (Rahayu et al., 2020).

Ravallion yang dikutip dalam buku Arsyad, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki dana untuk berobat. Pada umumnya orang miskin tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan merupakan ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu (Safina Hasibuan & Lestari, n.d.).

Menurut BPS penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

B. Garis Kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi

(padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan.
GKM = Garis Kemiskinan Makanan.
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan.

Metode penghitungan ini merupakan dasar penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

Z = garis kemiskinan.

i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

N = jumlah penduduk.

$\alpha = 0,1,2$

$\alpha = 0$; poverty head count index (P0).

$\alpha = 1$; poverty gap index (P1).

$\alpha = 2$; poverty distributionally sensitive index (P2).

- a) Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- c) Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

C. Jenis – Jenis Kemiskinan.

1. Kemiskinan Absolut: Kemiskinan mutlak mengacu pada ketidak mampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara memadai seperti makanan, air bersih, perumahan yang layak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan absolut sering dikaitkan dengan kondisi ekstrem di mana kekurangan mempengaruhi kelangsungan hidup individu atau keluarga.
2. Kemiskinan relatif: Kemiskinan ini diukur relatif terhadap standar sosial atau ekonomi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seseorang atau keluarga dianggap miskin jika pendapatan atau kekayaannya jauh di bawah rata-rata masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural: Situasi di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami kemiskinan karena norma dan nilai budaya yang diterima secara sosial. Misalnya, jika masyarakat percaya bahwa pekerjaan tertentu hanya cocok untuk jenis kelamin tertentu, orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak akan melakukannya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Kemiskinan budaya sering dikaitkan dengan sikap dan perilaku psikologis tertentu yang menghalangi kemampuan seseorang

untuk keluar dari kemiskinan, seperti perasaan putus asa, kurang motivasi, dan kurang ambisi.

4. Kemiskinan struktural terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang hidup dalam kondisi terbatas karena faktor struktural sosial, ekonomi dan politik. Faktor-faktor tersebut antara lain ketimpangan pendapatan, ketegangan ekonomi antar wilayah, pengamatan kesempatan kerja, keterbatasan akses sumber daya, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan struktural lebih merupakan akibat dari ketidakadilan sistem yang ada di masyarakat.

D. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan muncul karena sebagian tempat belum tertangani secara memadai, sebagian sektor harus menampung kelebihan tenaga kerja, tingkat produktivitas rendah, dan sebagian masyarakat belum berpartisipasi dalam proses pembangunan serta tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara maksimal menurut (Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2011). Kemiskinan sendiri memiliki banyak penyebab, antara lain lingkungan, sosial budaya, ekonomi, politik dan kebijakan publik. Pengangguran, di sisi lain, disebabkan oleh tidak adanya lapangan kerja atau peluang usaha (Rapidah, 2019). Faktor - faktor penyebab kemiskinan begitu kompleks dan saling terkait sehingga kemiskinan tidak disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh banyak faktor. Selain beberapa faktor penyebab kemiskinan, kemiskinan memiliki beberapa karakteristik.

E. Karakteristik Kemiskinan

1. Kendala ekonomi.
2. Pendapatan yang tidak stabil.

3. Keterbatasan akses.
4. Ketergantungan pada pekerjaan tidak tetap atau informal.
5. Kesempatan pendidikan yang terbatas.
6. Kesehatan yang buruk.
7. Terbatasan akses perumahan yang layak.
8. Ketergantungan pada bantuan sosial.

F. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan memantau tingkat kemiskinan suatu penduduk. Berikut adalah beberapa indikator kemiskinan yang umum digunakan :

1. Ketimpangan pendapatan: Seperti indeks Gini, ketimpangan pendapatan mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk.
2. Tingkat kemiskinan absolut: Mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan menggunakan data pendapatan atau konsumsi rumah tangga.
3. Tingkat Kemiskinan Relatif: Mengukur persentase penduduk yang pendapatan atau standar hidupnya jauh di bawah rata-rata nasional atau standar khusus masyarakat.
4. Indeks Ketenagakerjaan: Indeks ini mengukur tingkat kemiskinan yang terkait dengan ketidakmampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai dan pendapatan yang stabil. Tingkat pekerjaan yang rendah dapat menjadi indikator kemiskinan
5. Akses terhadap pelayanan dasar: Indikator ini melihat akses individu atau rumah tangga terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Kurangnya akses ke layanan ini dapat mengindikasikan tingkat kemiskinan.

Menurut (Aprillyana, 2020) Indikator kemiskinan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Angka Kemiskinan.
2. Kedalaman Kemiskinan.

3. dan Keparahan Kemiskinan.

2.1.4 Jumlah Penduduk

A. Pengertian Jumlah Penduduk.

Penduduk adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang yang tinggal secara permanen atau sementara di suatu wilayah atau negara. Seseorang yang dianggap sebagai penduduk suatu daerah atau negara dapat memiliki berbagai karakteristik, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang etnis atau budaya, status sosial atau ekonomi, dll. Penduduk yang tinggal menetap di suatu daerah atau negara sering disebut sebagai penduduk Aborigin atau lokal, sedangkan mereka yang tinggal di daerah atau negara hanya sementara sering disebut sebagai penduduk sementara atau pendatang.

Menurut Badan pusat statistik 2022, Penduduk Indonesia adalah semua orang yang telah menetap di Indonesia, termasuk warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang telah tinggal selama satu tahun atau lebih atau berencana untuk tinggal di Indonesia setidaknya selama satu tahun. Pada sensus sebelumnya, waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan aras UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada Pasal 15.

Dalam teori populasi Thomas Robert Malthus, jumlah penduduk akan cenderung bertambah secara eksponensial tetapi sumber daya alam (misalnya makanan) tidak dapat bertambah secepat itu. Ini berakibat dalam jangka panjang, perbedaan antara ketersediaan sumber daya dan permintaan akan semakin luas. Malthus percaya bahwa ada dua faktor yang mengontrol jumlah penduduk : kontrol alami (kematian dan kelaparan) dan kontrol manusia (rumah tangga terkontrol, teknik kontrol kelahiran, dan perang). Pada akhirnya, teorinya

menyatakan bahwa populasi akan stabil jika kontrol alami berasumsi bahwa penduduk akan dihalangi dari tumbuh dan berkembang secara alami dengan diresmikan.

Jumlah penduduk didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migras (Kelesaran P et al., 2022).

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting suatu Negara. pertumbuhan penduduk seimbang Dinamis Antara Kekuatan-Kekuatan yang Ditingkatkan dan Kekuatan untuk mengurangi ukuran populasi. Jumlah penduduk akan terus dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (peningkatan jumlah penduduk), tetapi pada saat yang sama akan Kurangi oleh jumlah kematian yang terjadi untuk semua kelompok umur. Pada saat yang sama, imigrasi juga berperan, pendatang (imigran) akan meningkat, emigran akan mengurangi jumlah penduduk (Silastri, 2017).

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut (Lintang Parameswari et al., 2015).

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk:

1. Faktor kematian: Faktor ini merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi populasi karena kematian mencegah orang tumbuh dan berkembang di suatu daerah.

2. Faktor kelahiran: Jumlah kelahiran yang tinggi dapat meningkatkan jumlah penduduk.
3. Imigrasi: Imigrasi dapat meningkatkan populasi secara langsung atau tidak langsung.
4. Emigrasi: emigrasi dapat mengurangi populasi karena imigran meninggalkan daerah tertentu.
5. Faktor ekonomi: Faktor ekonomi seperti produktivitas, ketersediaan lapangan kerja dan perubahan harga dapat mempengaruhi jumlah penduduk suatu daerah.

C. Pengendalian Jumlah Penduduk

Pengendalian jumlah penduduk merupakan suatu rancangan kegiatan yang ditujukan untuk membatasi laju pertumbuhan penduduk. Kebanyakan dari teknik pengendalian jumlah penduduk yang umum di masyarakat adalah dengan cara mengurangi angka kelahiran. Upaya pengendalian jumlah penduduk yang diterapkan oleh Indonesia salah satunya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran baru.

Secara umum, terdapat dua cara yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam menerapkan pengendalian jumlah penduduk. Pertama adalah positive check, yaitu suatu teknik pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat dikontrol, contohnya seperti adanya wabah dan terjadinya peperangan. Kedua adalah preventive check, yaitu teknik pengendalian jumlah penduduk dengan melakukan pengekangan moral untuk membatasi kelahiran dengan menunda

pernikahan atau pembatasan jumlah anggota keluarga (Syarifuddin & Mulda, 2020).

D. Indikator kependudukan

Menurut BPS indikator kependudukan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk.
2. Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Kepadatan Penduduk per km²
4. Rasio Jenis Kelamin.
5. Rasio Ketergantungan.

2.1.5 Pengangguran.

A. Pengertian Pengangguran.

Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan keinginannya, dan secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil. Pengangguran juga dapat terjadi ketika orang yang sebelumnya bekerja kehilangan pekerjaannya karena alasan tertentu seperti pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran (Jalil & Kasnelly, 2019).

Pengangguran (unemployment) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau

para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, yang mampu menyerapnya (Rahayu et al., 2020)

Pengangguran dalam pengertian standar ditentukan oleh definisi Internasional, yaitu seseorang yang digolongkan sebagai bagian dari angkatan kerja secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang diinginkannya (Kasim et al., 2021). Menurut (Mankiw, 2013), pengangguran merupakan masalah ekonomi makro paling serius yang secara langsung dapat merugikan manusia. Pengangguran meliputi mereka yang aktif mencari pekerjaan, mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa tidak mampu, dan mereka yang siap untuk memulai usaha (Lavenia et al., 2023).

B. Pengukuran Tingkat Pengangguran.

Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

Rumus :

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

C. Jenis-Jenis Pengangguran.

1. Pengangguran friksional.

Pengangguran friksional terjadi ketika seseorang sedang mencari pekerjaan baru atau memasuki angkatan kerja untuk pertama kalinya.

2. Pengangguran struktural.

Pengangguran struktural terjadi ketika perubahan ekonomi menyebabkan permintaan tenaga kerja bergeser dari satu sektor ke sektor lain, atau ketika keahlian atau ketrampilan seseorang tidak lagi sesuai dengan permintaan pasar.

3. Pengangguran siklikal.

Pengangguran siklikal terjadi ketika aktivitas ekonomi turun atau mengalami resesi, mengakibatkan lebih sedikit pekerjaan dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pengangguran siklikal kadang-kadang disebut pengangguran bersama.

4. Pengangguran musiman.

Pengangguran musiman terjadi ketika seseorang kehilangan pekerjaan karena perubahan musim atau aktivitas ekonomi terkait musim. Misalnya, seseorang yang bekerja di industri pariwisata mungkin akan kehilangan pekerjaan saat musim liburan berakhir.

D. Dampak Pengangguran

1. Dampak pada individu.

- a. Penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup.
- b. Stres dan depresi karena ketidakpastian ekonomi.
- c. Kehilangan kepercayaan diri dan tujuan hidup.
- d. Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

2. Dampak terhadap perekonomian

- a. Penurunan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

- b. Penurunan pendapatan perkapita dan penurunan pendapatan nasional.
 - c. Menambah beban keuangan dan sosial pemerintah.
 - d. Penurunan investasi karena kurangnya permintaan pasar dan ketidakpastian ekonomi.
3. Dampak terhadap masyarakat
- a. Tingkat kejahatan meningkat dan masyarakat berada dalam kekacauan.
 - b. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan bertambahnya kemiskinan.
 - c. Kontribusi masyarakat terhadap perekonomian nasional berkurang.
- Dampak pada Masyarakat

E. Penyebab Pengangguran.

1. Perubahan teknologi: Kemajuan teknologi dan otomasi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu.
2. Ketidaksihesuaian keterampilan: Dalam beberapa kasus, pekerjaan tersedia tetapi tidak cukup pekerja dengan keterampilan yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.
3. Ketimpangan pendapatan: Ketimpangan pendapatan yang parah dalam suatu masyarakat mempengaruhi tingkat pengangguran.
4. Faktor demografis: pertumbuhan penduduk yang cepat atau perubahan struktur demografis dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Pengangguran dapat meningkat jika jumlah tenaga

kerja baru yang memasuki angkatan kerja melebihi kapasitas perekonomian untuk menyerapnya.

F. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran

1. Program Kartu Prakerja: Diluncurkan pada tahun 2020, sistem ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang menganggur atau ingin meningkatkan keterampilan. Program ini memberikan subsidi pelatihan dan insentif kepada peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan.
2. Program Padat Karya Tunai: Program ini merupakan program yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan padat karya seperti pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan lingkungan. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang yang menganggur atau dalam pekerjaan yang tidak aman.
3. Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Program ini bertujuan untuk membantu pengusaha meningkatkan usahanya dengan memberikan kemudahan akses permodalan, pelatihan, teknologi dan fasilitas lainnya. Program ini juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja bagi warga yang terkena dampak kehilangan pekerjaan.

G. Indikator Pengangguran.

Menurut BPS Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk

usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan,
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2.1.6 Upah

A. Pengertian Upah

Upah adalah pembayaran atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Upah biasanya diberikan dalam bentuk uang dan merupakan bagian penting dari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Upah minimum adalah salah satu pembayaran yang dilakukan pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas tenaga kerja yang diberikan. Diberikan dalam bentuk uang menurut undang-undang dan ketentuan perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja, yang dapat mencakup manfaat bagi kedua anggota keluarga (Lavenia et al., 2023).

Upah minimum adalah upah atau gaji minimum selama satu bulan yang besarnya ditetapkan oleh gubernur dan dijadikan pedoman bagaimana pengusaha dan industri membayar pekerja (Mila Ningrum et al., 2022). Upah minimum adalah upah minimum bulanan yang ditetapkan setiap tahun di suatu daerah sebagai jaring pengaman. Upah minimum merupakan batas upah karena peraturan melarang pengusaha membayar pekerja kurang dari upah minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di provinsi atau sering kita dengar upah minimum

provinsi dan ditetapkan di kabupaten/kota disebut upah minimum kabupaten/kota (Aprilsesa Dian et al., 2023).

Pengertian upah berdasarkan pasal 1 ayat 30 (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003, n.d.*) tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut ini: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah minimum provinsi berlaku untuk Semua kabupaten/kota dalam satu provinsi. Salah satu tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menutup kesenjangan antara upah tertinggi dan terendah perusahaan. Upah yang diberikan oleh pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga tenaga kerja yang dikorbankan oleh buruh untuk kebutuhan produksi (Khoirunnisa, 2023).

Upah minimum ditetapkan sesuai dengan standar hidup yang layak di suatu daerah. Upah minimum adalah nilai upah minimum yang diberikan oleh setiap pengusaha kepada pekerja, dan pengusaha tidak diperkenankan menetapkan upah di bawah upah minimum. Ini dirancang untuk melindungi pekerja dari eksploitasi perusahaan. Upah minimum mencakup dua jenis, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Rena Armita & Rr Retno Sugiharti, 2022).

Upah minimum meliputi:

1. Upah minimum provinsi yang disingkat UMP yaitu upah minimum berlaku untuk semua kabupaten/kota dalam satu provinsi.

2. Upah Minimum Kabupaten / Kota yang disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten / kota.
3. Upah minimum provinsi sektoral disingkat UMSP adalah upah minimum yang diterapkan secara sektoral di provinsi.
4. Upah minimum sektoral kabupaten /kota disingkat UMSK adalah upah minimum yang berlaku daerah provinsi / kota secara sektoral.

B. Jenis-Jenis Upah

Menurut (Rivai Veithzal, 2013)Upah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Upah waktu, yaitu upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan waktu kapasitas kerja, dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan.
2. Upah per unit produksi (satuan hasil), yaitu upah yang dibayarkan kepada pekerja oleh prestasi yang dibuat oleh para pekerja ini, diberikan atas dasar jumlah hasil yang diperoleh dalam jangka waktu singkat.
3. Upah menurut borongan, yang merupakan pengupahan yang menetapkan besarnya upah berdasarkan volume pekerja dan waktu eksekusi.

Dan jenis-jenis upah antara lain:

1. Upah harian: upah harian adalah jumlah yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jumlah hari kerja. Pekerja dibayar sesuai dengan jumlah hari mereka bekerja, biasanya dalam minggu kerja normal.
2. Upah mingguan: upah mingguan adalah jumlah yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan pada jumlah jam atau hari kerja dalam

seminggu. Pekerja biasanya menerima upah tetap setiap minggu dalam bentuk upah mingguan.

3. Upah bulanan: upah bulanan adalah jumlah yang dibayarkan kepada karyawan setiap bulan.
4. Upah Komisi: upah komisi adalah jenis upah yang diberikan kepada karyawan berdasarkan penjualan atau prestasi tertentu. Karyawan menerima komisi berdasarkan persentase dari pendapatan yang mereka hasilkan.
5. Upah tetap: upah tetap adalah jenis upah di mana pekerja dibayar dengan jumlah yang sama di setiap periode pembayaran, terlepas dari faktor - faktor seperti penjualan atau produksi.
6. Upah lembur: upah lembur adalah pembayaran tambahan kepada karyawan ketika mereka bekerja di luar jam kerja normal atau melebihi jam kerja seperti yang ditentukan oleh undang-undang atau perjanjian kerja.

Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, terdiri atas:

1. Upah tanpa tunjangan; atau.
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau.
3. Dalam hal komponen Upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

C. Indikator Upah.

Menurut Djoko (2016: 28) indikator upah Menurut kebijakan pengupahan yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi pekerja/buruh sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 ayat 2, meliputi:

1. Upah minimum.
2. Upah kerja lembur.
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan.
5. Upah karena menjalankan hak waku istirahat kerjanya.
6. Bentuk dan cara pembayaran upah.
7. Denda dan potongan upah.

Indikator-indikator sistem upah menurut Ditanugraha (2013) dilihat dari sistem pengupahan dapat diukur melalui:

1. Sistem Pengupahan menurut kebutuhan
2. System upah menurut produksi.
3. Tingkat kesesuaian kerja berdasarkan lama jam kerja.
4. Tingkat kesesuaian upah berdasarkan senioritas.

2.1.7. Inflasi.

A. Pengertian Inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan selama periode waktu tertentu. Dalam kondisi inflasi, daya beli uang menurun karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan penawaran dan permintaan, kenaikan biaya produksi, kebijakan moneter dan penyalahgunaan pajak.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang umum secara terus-menerus. Penurunan harga secara terus-menerus, akibatnya daya beli masyarakat

bertambah besar sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat (Rahayu et al., 2020).

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda (Kasim et al., 2021). Menurut pemikiran Keynes, mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga dari keadaan tersebut kemudian nantinya akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang akan melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya akan terjadi gap.

B. Teori-Teori Inflasi.

1. Teori Kuantitas.

Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Menurut teori ini Ada tiga alasan mengapa kenaikan harga secara umum dapat dengan mudah menyebabkan inflasi: peredaran uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain terlalu cepat (masyarakat mengkonsumsi terlalu banyak), terlalu banyak uang cetakan yang beredar di antara masyarakat, dan penurunan jumlah produksi nasional. Inti dari teori kuantitas ini adalah Inflasi terjadi hanya ketika jumlah uang bertambah dalam sirkulasi, baik uang kartal maupun uang giral. Dan laju inflasi juga ditentukan oleh laju kenaikan jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa mendatang.

2. Teori Keynes.

Teori keynes tersebut menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Inflasi Keynes, yang berpandangan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga permintaan efektif masyarakat terhadap barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang yang tersedia (penawaran agregat), dan hasilnya adalah gap inflasi. Keterbatasan penawaran suatu komoditas (penawaran agregat) terjadi karena kapasitas produksi dalam jangka pendek tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi peningkatan permintaan agregat.

3. Teori Strukturalis.

Teori ini didasarkan penyebab inflasi yang berasal dari kekacauan struktur ekonomi, khususnya kekuatan suplay bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab struktural pertambahan barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan ekonominya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak dibenahi atau ditambah.

C. Jenis-Jenis Inflasi.

- a. Inflasi rendah, yaitu inflasi dengan kenaikan harga berjalan sangat lambat dengan persentase kecil, yaitu dibawah 10% per tahun.
- b. Inflasi sedang, yaitu jika persentase laju inflasinya sebesar 10% - 30% per tahun.
- c. Inflasi tinggi, yaitu jika persentase laju inflasinya sebesar 30% - 100% per tahun.

d. Hiperinflasi, yaitu jika persentase laju inflasinya lebih dari 100%.

D. Golongan Inflasi.

Inflasi dapat di bagi ke dalam tiga katagori yaitu:

1. Inflasi Ringan: Inflasi ringan terjadi ketika tingkat inflasi berkisar antara 1-3 % per tahun. Inflasi ringan biasanya terjadi ketika ekonomi tumbuh dengan stabil, permintaan dan penawaran barang dan jasa seimbang, dan produksi masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Inflasi Menengah: Inflasi menengah terjadi ketika tingkat inflasi berkisar antara 3- 10% per tahun. Inflasi menengah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga bahan bakar, kenaikan upah, dan kenaikan harga impor.
3. Inflasi Berat: Inflasi berat terjadi ketika tingkat inflasi melebihi 10% per tahun. Inflasi berat dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan seperti menurunnya nilai tukar mata uang, penurunan daya beli masyarakat, dan melemahnya kepercayaan investor.

E. Faktor Penyebab Inflasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat inflasi, yaitu :

1. Meningkatnya permintaan, jika permintaan konsumen terhadap barang dan jasa meningkat, sedangkan pasokannya terbatas, harga akan naik karena penawaran tidak dapat memenuhi permintaan.
2. Kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan energi dapat mendorong perusahaan untuk menaikkan harga barang dan jasa untuk mempertahankan keuntungan mereka.
3. Kelangkaan pasokan, jika pasokan barang dan jasa terbatas, maka harga akan naik karena permintaan tidak dapat dipenuhi.
4. Kenaikan harga internasional, jika harga barang impor meningkat, maka harga barang lokal yang serupa juga akan meningkat.

5. Penurunan nilai tukar Penurunan, jika nilai tukar mata uang suatu negara dapat mendorong inflasi karena harga barang impor akan naik.

Dalam buku (Rahayu et al., 2020) penyebab inflasi di golongan dalam empat macam yaitu:

1. Inflasi tarikan permintaan (Demand Pull Inflation), inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan (demand) yang diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi.
2. Inflasi desakan biaya (Cost Push Inflation), inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi.
3. Inflasi campuran, inflasi yang disebabkan oleh kombinasi (campuran) antara unsur inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.
4. Inflasi impor atau Imported Inflation, terjadi karena pengaruh inflasi luar negeri.

F. Dampak Inflasi.

➤ Dampak buruk inflasi, antara lain

1. Daya Beli Berkurang : Inflasi menaikkan harga barang dan jasa, membuat uang yang dimiliki masyarakat menjadi tidak berarti dan daya beli menurun. Akibatnya, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhannya karena harga barang semakin mahal.
2. Berkurangnya investasi : Inflasi yang tinggi mengurangi tingkat investasi karena keengganan investor untuk berinvestasi. Ini terjadi

karena mereka takut uang yang diinvestasikan akan kehilangan nilainya akibat inflasi.

3. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat : Inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena membuat harga barang dan jasa tidak stabil. Hal ini dapat membuat konsumen kurang mau membeli barang dan jasa, mengurangi permintaan dan berdampak pada produksi dan pendapatan perusahaan.
4. Nilai tukar mata uang turun : Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan nilai tukar mata uang turun, karena negara yang mengalami inflasi akan kehilangan kepercayaan negara lain terhadap solvabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonominya.

➤ Dampak beberapa pihak yang diuntungkan

1. Pengusaha : Inflasi akan menyebabkan harga produk lebih tinggi, sehingga pengusaha dapat meningkatkan keuntungan. Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan biaya produksi turun, apalagi jika biaya tenaga kerja bersifat tetap.
2. Debitur: Inflasi menyebabkan uang pinjaman menurun nilainya, sehingga debitur dapat membayar kembali utangnya dengan uang yang lebih sedikit.
3. Pemerintah: Inflasi membantu pemerintah mengurangi beban utang nasional karena nilai utang menjadi lebih rendah selama periode waktu tertentu.

G. Mengatasi Inflasi.

Menurut buku perekonomian indonesia (Rahayu et al., 2020) Untuk mengatasi terjadinya inflasi, bisa dilakukan kebijakan uang ketat meliputi :

1. Peningkatan tingkat suku bunga.
2. Penjualan surat berharga.
3. Peningkatan cadangan kas.
4. Pengetatan pemberian kredit.

H. Indikator Inflasi.

1. Indeks Harga Konsumen (IHK): IHK mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama suatu periode tertentu.

Rumusnya :

$$1. In = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana :

In = inflasi.

IHK_n = indeks harga konsumen tahun dasar.

IHK_{n-1} = indeks harga konsumen tahun sebelumnya.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index).

Jika IHK melihat dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

3. Indeks harga Implisit (GDP Deflator).

Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP deflator) disingkat IHI. Perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka Indeks.

I. Cara Mencegah Inflasi.

- 1) Kebijakan Moneter: Bank Sentral (BI) dapat menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga, menaikkan giro wajib minimum bank, dan menaikkan reserve requirement ratio (RRT) bank. Hal ini bertujuan untuk menekan permintaan uang masyarakat sehingga harga barang dan jasa tidak naik terlalu tinggi.
- 2) Kebijakan Fiskal: Pemerintah dapat menurunkan belanja negara, menaikkan pajak, dan menaikkan suku bunga obligasi negara untuk menarik minat investor. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan subsidi untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng
- 3) Kebijakan Penentuan Harga dan Indexing : ini dilakukan dengan penentuan harga, serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah (gaji/upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan.

2.2. Penelitian Terdahulu

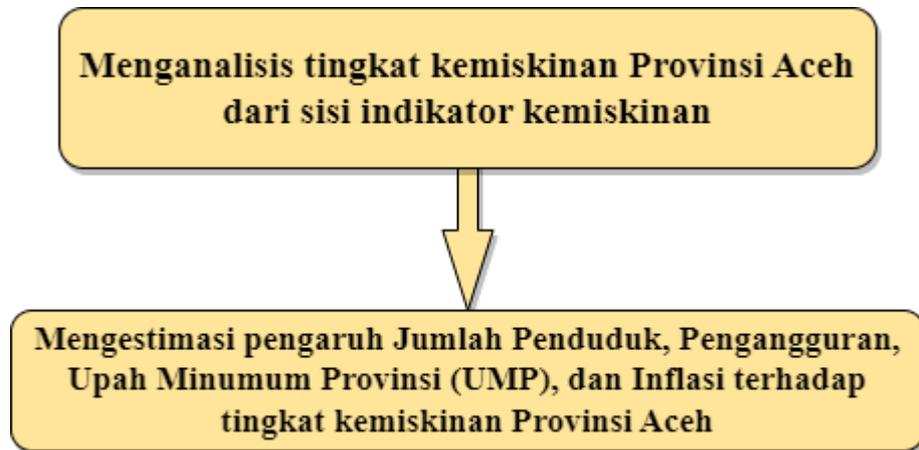
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1. Lulut Lavenia 2. Syafri Mandai 3. Muhammad Yudhi Lutfi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trisakti, 2023	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2021	1. Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) 2. Upah Minimum 3. Pengangguran 4. Jumlah Penduduk 5. Angka Melek Huruf 6. Kemiskinan	1. Upah Minimum Dan Tingkat Melek Huruf Memiliki Efek Anti-Kemiskinan Yang Mendalam. 2. Sementara Pertumbuhan Produk Regional Bruto, Pengangguran, Dan Jumlah Penduduk Semuanya Memiliki Efek Positif Terhadap Kemiskinan.
Musa Al Jundi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2014	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia	1. Kemiskinan 2. Produk Domestik Regional Bruto 3. Rata-Rata Lama Sekolah, 4. Upah Minimum Regional 5. Penganggura 6. Tingkat Inflasi	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan, 2. Rata-Rata Lama Sekolah Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan, 3. Upah Minimum Regional Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan, 4. Tingkat Pengangguran Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan, 5. Tingkat Inflasi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan
1. Ayunita Kristin 2. Ida Bagus Darsana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 2020	Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali	1. Inflasi 2. Pendidikan, 3. Pengangguran, 4. Kemiskinan.	Hasil Penelitian Menunjukkan 1. Inflasi Dan Pendidikan Berpengaruh Negatif Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2018. 2. Inflasi, Pendidikan Dan Pengangguran Berpengaruh

			Positif Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2018. 3. Pengangguran Memediasi Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2018.
1. Meli Sukawati 2. Rido Simatupang 3. Jevrianto Butar-Butar 4. Revina Manurung 5. Pirnando Sagala Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hkbp Nommensen, Medan. 2022	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2020	1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Pengangguran 4. Upah Minimum	Hasil Dari Pembahasan Penelitian Ini, 1. Pertumbuhan Ekonomi Memiliki Pengaruh Yang Negatif Namun Tidak Signifikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. 2. Pengangguran Memiliki Pengaruh Yang Positif Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Namun Tidak Signifikan, 3. Upah Minimum Memiliki Pengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
1. Rezki Mardiatillah 2. Maya Panorama 3. Rinol Sumantri Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah, Palembang. 2021	Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019	1. Pengangguran 2. Inflasi 3. Kemiskinan	1. Pengangguran Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Selatan, 2. Inflasi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Selatan
Suci Fitriani Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang, 2021	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Ketimpangan Pendapatan 3. Pengangguran, 4. Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) 5. Kemiskinan.	(1) Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat, (2) Ketimpangan Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat, (3) Pengangguran Tidak Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat, (4) Indeks Pembangunan Manusia Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat

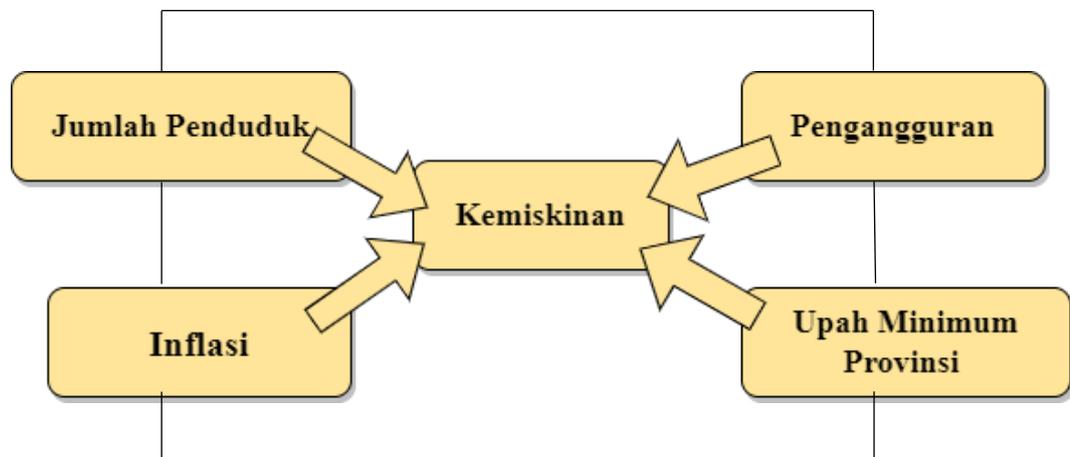
2.3. Kerangka Penelitian.

2.3.1. Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2.4 Kerangka Analisis Penelitian

2.3.2. Kerangka Konseptual



Gambar 2.5 Bagan Konseptual

Dalam model ini, Variabel Jumlah Penduduk, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Kemiskinan, yang dimana Kemiskinan merupakan variabel terikat.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2013).

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah terkumpul untuk memberikan informasi mengenai suatu fenomena yang ada tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan Menurut (Sugiyono, 2013).

3.2. Defenisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Tingkat Kemiskinan. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Jumlah Penduduk, Pengangguran, Upah

Minimum Provinsi, dan Inflasi. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1 Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi Operasional	Satuan	Sumber Data
1	Tingkat Kemiskinan (TK)	Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2003-2022	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id
2	Jumlah Penduduk (JP)	Banyaknya penduduk Provinsi Aceh di 23 kabupaten/kota selama tahun 2003-2022.	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id
3	Pengangguran (PG)	Tingkat pengangguran terbuka dalam angkatan kerja sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan, di Provinsi Aceh pada tahun 2003-2022.	Persen	Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id
4	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Upah bulanan terendah di Provinsi Aceh tahun 2003-2022	Rupiah	Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id
5	Inflasi (INF)	Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus. berdasarkan perhitungan per tahun 2003-2022.	Persen	Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data di medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan melihat data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistika.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah 4 bulan terhitung dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kuantitatif yang bersifat data nominal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi.

3.4.2 Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, website Badan Pusat Statistik (BPS).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi karena mengambil data Provinsi Aceh yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah penduduk kemiskinan, jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi, dan inflasi.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-

data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis tingkat kemiskinan provinsi aceh dan pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan provinsi aceh.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dinaik turunkan nilainya (dimanipulasi). Analisis regresi berganda akan dilakukan apabila jumlah dari variabel independennya minimal dua menurut (Sugiyono, 2017).

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Seberapa besar variable independen (jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi dan inflasi) mempengaruhi variable dependen (kemiskinan) dihitung dengan menggunakan persamaan garis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$TK_t = \alpha_0 + \alpha_1 JP_t + \alpha_2 PG_t + \alpha_3 UMP_t + \alpha_4 INF_t + \varepsilon_t$$

Variabel-variabel JP, PG, UMP, INF adalah variabel independen (variabel bebas), sedangkan TK variabel dependen (variabel tidak bebas).

Keterangan:

TK_t	= Tingkat Kemiskinan (Ribuan Jiwa)
α_0	= Konstanta
JP_t	= Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh (Ribuan Jiwa)
PG_t	= Pengangguran di Provinsi Aceh (Persen)
UMP_t	= Upah Minimum Provinsi di Provinsi Aceh (Rupiah)
INF_t	= Inflasi di Provinsi Aceh (Persen)
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$	= Koefisien
t	= Unit Waktu (2003-2022)
e	= <i>term of error</i>

1. Penaksiran

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi adalah nilai yang ditunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel Jumlah Penduduk, Pengangguran, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Hubungan linier antara dua variabel koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r, dimana bervariasi antara -1 hingga +1, menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai - (negatif) artinya korelasi antara dua variabel tersebut bersifat berlawanan peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan nilai Y.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Kapasitas model untuk memasukkan variasi dalam variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa

kemampuan variabel dependen sangat terbatas, dan nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu (Kuncoro, 2013).

2. Pengujian (Test Diagnostic)

a. Uji Parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat korelasi secara parsial dari masing-masing variabel bebas yang diamati terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1). Perumusan Hipotesis

- Hipotesis $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh).
- Hipotesis $H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh).

2). Uji Statistik yang digunakan adalah uji korelasi, dimana t hitung adalah:

$$th = \frac{\alpha_i}{Se. \alpha_i}$$

Dimana:

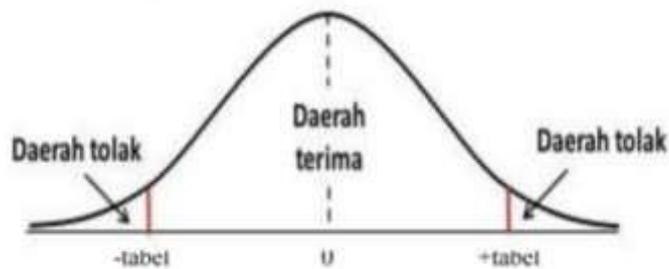
α_i = Koefisien regresi

Se = Standar error

Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel = $\pm t (\alpha/2, n - 1)$.

3). Kriteria Uji

H0 diterima jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Grafik Kriteria Uji Statistika T

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai $sig < \alpha = 5\%$

4). Kesimpulan

Jika sesuai kriteria uji, maka terima H0 atau tolak H0.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji f dilakukan untuk mengetahui pada model I apakah variabel JP, PG, UMP, dan INF secara keseluruhan signifikan secara statistika dalam mempengaruhi variabel TK. Uji f dapat dihitung dengan rumusan berikut:

$$Fh = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana

k = Jumlah parameter yang diestimasi adalah ada 5 variabel

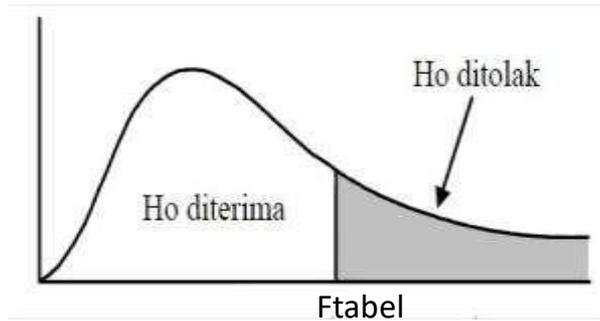
n = Jumlah Observasi

Dibanding dengan F tabel = $F(\alpha, n-k-1)$

Kriteria Uji

Terima H0 jika F hitung $< F$ tabel, hal ini tolak H0.

Atau dalam distribusi kurva F dalam digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Grafik kriteria Pengujian Statistik F

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai signifikan $< \alpha=5\%$. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan nilai prob.F-Statistik atau p-value pada e-views.

- **Kesimpulan**

- a. Jika p-value $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

- c. **Uji Asumsi Klasik**

Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Multikolinieritas, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi yang akan dibahas lebih lanjut satu per satu pada bagian selanjutnya (Setiawan Prihatino, 2020).

1. **Uji Multikolinearitas**

Digunakan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat/tinggi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas, maka terjadi multikoloneritas, demikian juga sebaliknya. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Uji multikolinieritas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (variance Inflasi Faktor) dan koefisien korelasi antara variabel bebas, (Siswadi, 2016). Kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.
2. Jika koefisien antara variabel bebas kurang dari 0,10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas.

2. Uji normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi sebaran data variabel bebas dan terikat tersebut berdistribusi normal adalah tidak (Juliandi, Manurung, & Setiawan, 35 2016). Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menuguji, yaitu melalui pendekatan Histogram dan pendekatan Grafik. Pada pendekatan histogram dan berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri dan kekanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila tidak mengikuti data disepanjang garis diagonal.

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setaip gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observation R-Squared lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila di dandu adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau no-autocorrelation (Gujarati, 2003).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum tempat penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ – $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ – $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa.

Gambar 4.1 Peta wilayah Provinsi Aceh



Luas Provinsi Aceh 56.839 km² . Batas-batas wilayah Provinsi Aceh,

- Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera

Utara. Provinsi Aceh dikelilingi dengan suaka cagar alamnya, Lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di delapan lokasi, yaitu Cagar Alam Jantho, Cagar Alam Serbajadi, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak, Taman Wisata Alam Jantho, Taman Wisata Alam Kuta Malaka, dan Taman Buru Lingga Isaq.

4.1.2 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Aceh

Kemiskinan merupakan hal yang umum yang banyak dialami oleh berbagai daerah sebagai akibat dari kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, kurangnya kepemilikan sumber daya, dan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, menjadi penyebab kemiskinan terjadi. Berbagai penanggulangan kemiskinan sudah mulai diatasi dengan berbagai cara oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat penduduk miskin di daerah-daerah. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh selama tahun 2003 sampai 2022 dapat dilihat dari tabel 4.1

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2003	1.254,2	29,76
2004	1.157,2	28,47
2005	1.166,4	28,69
2006	1.149,7	28,28
2007	1.083,7	26,65
2008	962,3	23,55
2009	885,8	21,61
2010	898,4	19,95
2011	900,2	19,48
2012	880,5	18,58
2013	856,9	17,72

2014	837,4	16,98
2015	851,6	17,08
2016	848,44	16,73
2017	872,61	16,89
2018	839,49	15,97
2019	819,44	15,32
2020	814,91	14,99
2021	834,24	15,33
2022	806,82	14,64

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh

Dari Tabel 4.1 diatas tampak bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh dari tahun 2003-2022 mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh di angka tertinggi selama 20 tahun terakhir yaitu pada tahun 2003 sebesar 1.254,2 juta/jiwa dengan persentase 29,76 persen, dan peringkat ke dua dengan jumlah penduduk tertinggi di tahun 2005 sebesar 1.166,4 jiwa dengan persentase 28,69 persen. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 terjadi ketika ada bencana alam pada 26 desember 2004. dan terendah pada tahun 2022 sebesar 806,82 ribu/jiwa dengan persentase 14,64 persen. Jumlah penduduk miskin di provinsi mengalami fluktuasi naik turun dimulai kenaikan di tahun 2005 dan turun di tahun 2006-2009 dan naik kembali di tahun 2010-2011. Di tahun 2012-2014 mengalami penurunan dan di tahun berikutnya 2015 mengalami kenaikan sebesar 851,6 ribu/jiwa dan di tahun 2017, 2021 mengalami kenaikan. Di tahun 2021 Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.

4.1.3 Perkembangan Indikator Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat tiga ukuran yang

dipergunakan, yaitu persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indikator Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama 2003-2022 dapat dilihat di tabel 4.2.

Tabel 4.2 Indikator Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2003	29,76	6,73	2,12
2004	28,47	6,32	1,98
2005	28,69	5,83	1,85
2006	28,28	5,28	1,48
2007	26,65	5,41	1,64
2008	23,55	5,18	1,55
2009	21,61	3,88	1,46
2010	19,95	3,48	0,96

2011	19,48	3,48	0,94
2012	18,58	3,07	0,83
2013	17,72	3,20	0,83
2014	16,98	3,14	0,86
2015	17,08	3,10	0,83
2016	16,73	3,48	1,00
2017	16,89	2,98	0,81
2018	15,97	2,84	0,75
2019	15,32	2,64	0,66
2020	14,99	2,72	0,71
2021	15,33	2,86	0,75
2022	14,64	2,49	0,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh dari tahun 2003-2022 menunjukkan progses yang cukup baik, dimana persentase penduduk miskin mengalami penurunan dan hal ini dapat dilihat juga bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 25,76 persen menurun di tahun 2022 sebesar 14,64 persen. Walaupun untuk setiap tahunnya mengalami trend yang berfluktuasi kenaikan dan penurunan pada tahun tahun tertentu. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh memiliki kecenderungan menurun. Dalam 20 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2003 merupakan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 29,76 persen dan di tahun 2022 merupakan persentase terendah selama 20 tahun terakhir.

Adapun besar capaian nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Aceh untuk tahun 2022 adalah sebesar 2,49 persen. Nilai capaian ini mengalami

penurunan terhadap capaian di tahun 2021 yang sebesar 2,86 persen. Sementara itu untuk tahun 2003 sampai dengan 2022 menunjukkan pola yang konsisten mengalami fluktuasi naik turun. Dengan naiknya nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Aceh cenderung semakin menjauh garis kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin melebar.

Posisi indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Aceh, pada tahun 2003 sebesar 2,12 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 0,61. keparahan kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2003 – 2022 cenderung berfluktuasi, dimana dari tahun 2007, 2014, 2016, 2020, dan 2021 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2003-2022 indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa semakin rendah atau menurun nilai indek, maka semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sedangkan untuk tahun 2007, 2014, 2016, 2020, dan 2021 mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan demikian kondisi perekonomian penduduk miskin di Provinsi Aceh tahun 2006 ke 2007, 2013 ke 2014, 2015 ke 2016, dan 2019 ke 2021 dapat dikatakan masih belum stabil atau relatif belum menunjukkan pada arah yang lebih baik, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 menjadi lebih baik lagi. Karena angka terkecil selama 20 tahun yaitu di tahun 2022 sebesar 0,61.

4.1.4 Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh

Penduduk di Indonesia adalah semua orang yang telah menetap di Indonesia, termasuk warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang telah tinggal selama satu tahun atau lebih atau berencana untuk tinggal di Indonesia setidaknya selama satu tahun. Pada sensus sebelumnya, waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada Pasal 15. Jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong, karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki sebagai modal pembangunan dan juga memperluas pasar. Factor penghambat karena akan menurunkan produktivitas. Jumlah penduduk yang besar yang tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang mencukupi akan menimbulkan masalah kemiskinan yang lebih parah. Jumlah penduduk yang besar yang tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang mencukupi akan menimbulkan masalah kemiskinan yang lebih parah. Oleh karena itu penting adanya upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk. Adapun jumlah penduduk Provinsi Aceh tahun 2003-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Peduduk di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)
2003	4.218,486
2004	4.075,599
2005	4.031,589
2006	4.153,573
2007	4.223,833
2008	4.293,915
2009	4.363,477
2010	4.523,144
2011	4.619,033

2012	4.715,108
2013	4.811,133
2014	4.906,835
2015	5.001,953
2016	5.096,248
2017	5.189,466
2018	5.281,314
2019	5.371,532
2020	5.274,871
2021	5.333,733
2022	5.407,855

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh berdasarkan sensus tahun 2022 bertambah sebanyak 5,407,855 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya sebanyak 5,333,7333 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi banyak hal, yaitu Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan mengalami peningkatan. Di tahun 2004-2005 (bencana alam) mengalami penurunan jumlah penduduk, di tahun 2006-2019 mengalami kenaikan jumlah penduduk dan di tahun 2020 (covid-19) jumlah penduduk di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 5.274,871 juta/jiwa. Dan di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan kembali jumlah penduduk.

4.1.5 Perkembangan Pengangguran di Provinsi Aceh

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah penduduk yang telah masuk dalam angkata kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak mempunyai pekerjaan maka mereka tidak dapat memenuhi

kebutuhan pokok dengan baik. Pengangguran di Provinsi Aceh tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	Pengangguran (Persen)
2003	8,97
2004	9,35
2005	14,00
2006	10,43
2007	9,84
2008	9,56
2009	8,71
2010	8,37
2011	7,43
2012	9,10
2013	10,30
2014	9,02
2015	9,93
2016	7,57
2017	6,57
2018	6,34
2019	6,17
2020	6,59
2021	6,30
2022	6,17

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa pengangguran di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi meningkat pada tahun 2004, 2005, 2012, 2013, 2015, 2020. Pada tahun 2004 Persentase Pengangguran di Aceh sebesar 9,35%, yang sebelumnya 8,97%. Dan di tahun 2005 meningkat kembali menjadi 14,00%. Di tahun 2012 meningkat kembali pengangguran sebesar 9,10% dan 2013 sebesar 10,30%. Di tahun 2015 meningkat sebsar 9,93% dan 2020 sebsar 6,59%.

4.1.6 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Aceh

Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum di Provinsi dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Upah minimum merupakan upah terendah yang diterima karyawan/pekerja yang masa kerjanya dibawah satu tahun. Bagi yang bekerja lebih dari satu tahun, maka upah yang diterima diatur oleh peraturan perusahaan dengan sistem pengupahan yang telah disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja perusahaan. Upah Minimum Provinsi di Provinsi Aceh tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Upah Minimum Provinsi di Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	UMP
2003	425.000
2004	550.000
2005	620.000
2006	820.000
2007	850.000
2008	1.000.000
2009	1.200.000
2010	1.300.000
2011	1.350.000
2012	1.400.000
2013	1.550.000
2014	1.750.000
2015	1.900.000

2016	2.118.500
2017	2.500.000
2018	2.700.000
2019	2.916.810
2020	3.165.031
2021	3.165.031
2022	3.166.460

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

Dari tabel diatas, Upah Minimum Provinsi di Aceh mengalami peningkatan yang sebelumnya di tahun 2003 sebesar 425.000 dan di tahun 2022 sebesar 3.166.460. kenaikan upah pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya sebesar 1.429. Upah mempengaruhi terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingkat pengangguran.

4.1.7 Perkembangan Inflasi Provinsi di Provinsi Aceh

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga secara menyeluruh dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang yang tidak berdampak ke barang lain tidak bisa disebut sebagai inflasi, begitu pula dengan kenaikan harga musiman seperti kenaikan harga menjelang hari raya yang mana kenaikan tidak terjadi terus menerus. Perkembangan inflasi Provinsi Aceh tahun 2003-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 inflasi di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Inflasi	4,03	7,08	34,88	9,98	9,41	11,92	3,72	5,86	3,43	0,22

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi	7,31	8,09	1,53	3,95	4,25	1,84	1,69	3,59	2,24	5,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa inflasi di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi peningkatan selama 20 tahun terakhir sebanyak 10 kali di tahun di tahun 2004, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, dan 2022. Di tahun 2005 mengalami inflasi tertinggi selama 20 tahun terakhir sebesar 34,88% yang diakibatkan telah terjadinya bencana alam di akhir tahun 2004.

4.2 Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian

4.2.1 Hasil Analisis Regresi Faktor yang Mempengaruhi Tingkat

Kemiskinan di Provinsi Aceh Pada Tahun 2003-2022

A. Model Estimasi

Model ekonometrika pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$TK_t = \alpha_0 + \alpha_1 JP_t + \alpha_2 PG_t + \alpha_3 UMP_t + \alpha_4 INF_t + \varepsilon_t$$

Selanjutnya model tersebut akan diestimasi untuk memperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan tersebut. Di bawah ini merupakan hasil analisis regresi. Regresi dilakukan dengan variabel dependennya adalah Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh dan variabel independennya yaitu,

Jumlah Penduduk, Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh, dan Inflasi di Provinsi Aceh.

Tabel 4.7 Hasil Regresi Linier Berganda Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Dependent Variable: TK
 Method: Least Squares
 Date: 08/25/23 Time: 07:03
 Sample: 2003 2022
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	98.77778	23.21902	4.254176	0.0007
JP	-1.39E-05	6.17E-06	-2.255021	0.0395
PG	-0.883531	0.809781	-1.091073	0.2925
UMP	-5.62E-07	3.43E-06	-0.163700	0.8722
INF	0.174992	0.167965	1.041836	0.3140
R-squared	0.882093	Mean dependent var		25.37000
Adjusted R-squared	0.850651	S.D. dependent var		7.052823
S.E. of regression	2.725612	Akaike info criterion		5.055581
Sum squared resid	111.4344	Schwarz criterion		5.304514
Log likelihood	-45.55581	Hannan-Quinn criter.		5.104175
F-statistic	28.05472	Durbin-Watson stat		0.507321
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber: Eviews 10 dan diolah

Dari hasil regresi di atas yaitu terdapat variabel Jumlah Penduduk (JP) yang memiliki nilai probabilitas yang kurang ($\text{sig } \alpha < 5\%$, 10% dan 15%) yang berarti memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (TK). Sedangkan variabel independen Pengangguran di Provinsi Aceh (PG), Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) dan Inflasi (INF) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (TK). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih besar ($\text{sig } \alpha > 5\%$, 10% , dan 15%). Pada hasil regresi *time series* di atas memiliki nilai *Adjusted R-Squared* 0.850651 yang memiliki arti kemampuan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 85,06% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dengan demikian akan dilakukan pengujian

kembali dengan transformasi kedalam fungsi Logaritma Natural (LN) sebagai berikut.

Tabel 4.8 Hasil Regresi Linier Berganda Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Dependent Variable: LN_TK
 Method: Least Squares
 Date: 08/25/23 Time: 07:05
 Sample: 2003 2022
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.99768	6.700254	3.432360	0.0037
LN_JP	1.010470	0.491607	-2.055443	0.0577
LN_PG	-0.160981	0.095455	-1.686454	0.1124
LN_UMP	-0.279243	0.074411	-3.752736	0.0019
LN_INF	0.024706	0.014373	1.718888	0.1062
R-squared	0.866373	Mean dependent var		3.199558
Adjusted R-squared	0.857406	S.D. dependent var		0.262448
S.E. of regression	0.054165	Akaike info criterion		-2.781253
Sum squared resid	0.044007	Schwarz criterion		-2.532320
Log likelihood	32.81253	Hannan-Quinn criter.		-2.732659
F-statistic	107.7684	Durbin-Watson stat		0.892789
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 10 dan diolah

Dari hasil regresi setelah dilakukan logaritma natural (ln) di atas yaitu terdapat variabel independen yang seluruhnya berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (TK), variabel independen tersebut ialah Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh (JP), Pengangguran di Provinsi Aceh (PG), Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) dan Inflasi (INF). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil ($\text{sig } \alpha < 5\%$, 10% dan 15%). Hasil regresi *time series* di atas memiliki nilai *Adjusted R-Squared* berubah setelah dilakukannya logaritma natural (ln) sebesar 0.857406 yang memiliki arti kemampuan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 85% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

B. Metode Estimasi

- Penaksiran

1. Korelasi (r)

Tabel 4.9 Korelasi Antar Variabel Independen

	JP	PG	UMP	INF
JP	1.000000	-0.779448	0.967994	-0.538621
PG	-0.779448	1.000000	-0.783188	0.764058
UMP	0.967994	-0.783188	1.000000	-0.450237
INF	-0.538621	0.764058	-0.450237	1.000000

Sumber: Eviews 10 dan diolah

Dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan korelasi antar variabel independen, dimana variabel UMP memiliki nilai korelasi yang tinggi. Semakin tingginya Jumlah Penduduk (JP) maka akan berpengaruh pada Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP). Dimana disini maksudnya adalah variabel UMP memiliki hubungan linier yang sempurna terhadap JP.

2. Koefisien Determinasi (*R squared*)

Koefisien Determinasi atau *R-Square* menunjukkan bahwa nilai persentase total dalam menjelaskan variabel dependen dan variabel independen secara bersamaan. Berdasarkan dari model regresi estimasi setelah dilakukannya Logaritma Natural (LN), maka nilai *R-Square* adalah sebesar 0.866373. Hal ini memiliki arti bahwa secara bersamaan variabel Jumlah Penduduk (JP), Pengangguran di Provinsi Aceh (PG), Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP), dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) sebesar 86,63% menjelaskan variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (TK). Sedangkan 13,37% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi.

- **Pengujian**

- 1. Uji-t-statistik**

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil regresi yang didapatkan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah melakukan logaritma natural (ln), empat variabel independen yaitu Jumlah Penduduk, Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh, dan Inflasi di Provinsi Aceh memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Nilai signifikan variabel-variabel independen tersebut dihitung secara parsial.

- **Perumusan Hipotesis**

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ (Jumlah Penduduk, Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh, dan Inflasi di Provinsi Aceh tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh).

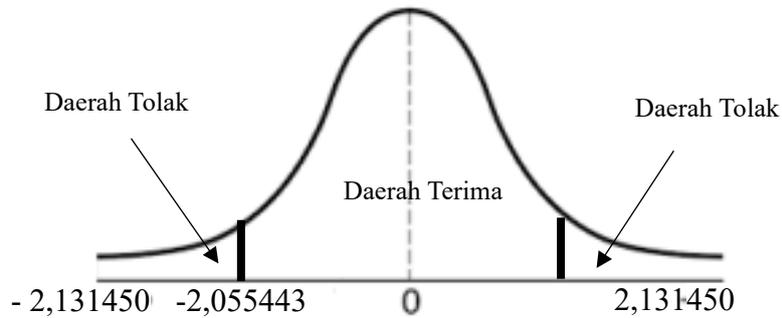
$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$ Jumlah Penduduk, Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh, dan Inflasi di Provinsi Aceh berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh).

- **Uji statistik t**

- a. Jumlah Penduduk (JP)**

Pada variabel ini menggunakan nilai α 5% memiliki nilai *t-statistic* -2,055443 dengan nilai *t-tabel* 2,131450. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan artinya Jumlah Penduduk berpengaruh dan signifikan terhadap

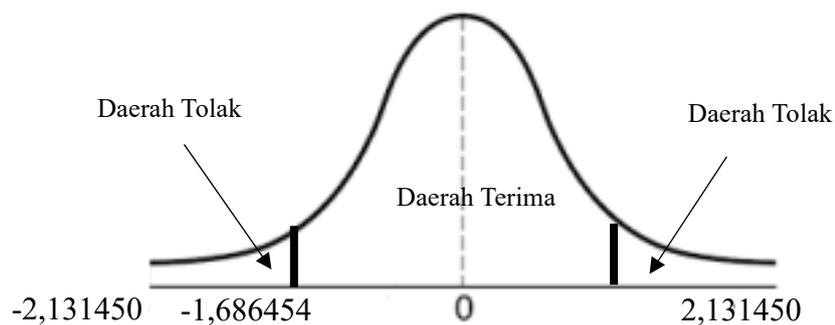
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Dapat dilihat juga melalui distribusi kurva normal t berikut.



Gambar 4.2 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel JP

b. Pengangguran di Provinsi Aceh

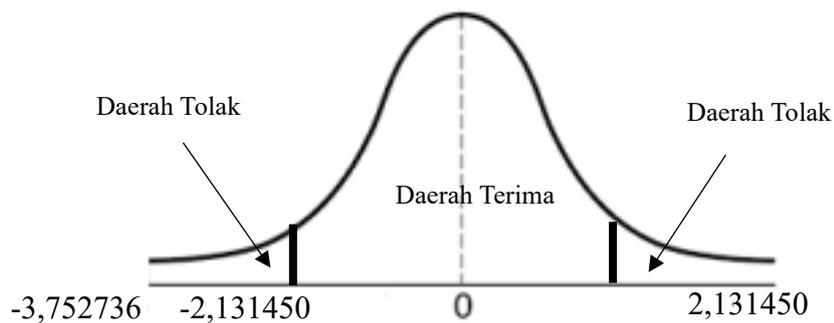
Pada variabel ini menggunakan nilai α 5% dan memiliki nilai *t-statistic* -1,686454 dengan nilai *t-tabel* 2,131450. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan artinya Pengangguran di Provinsi Aceh berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Dapat dilihat juga melalui distribusi kurva normal t berikut.



Gambar 4.3 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel PG

c. Upah Minimum di Provinsi Aceh

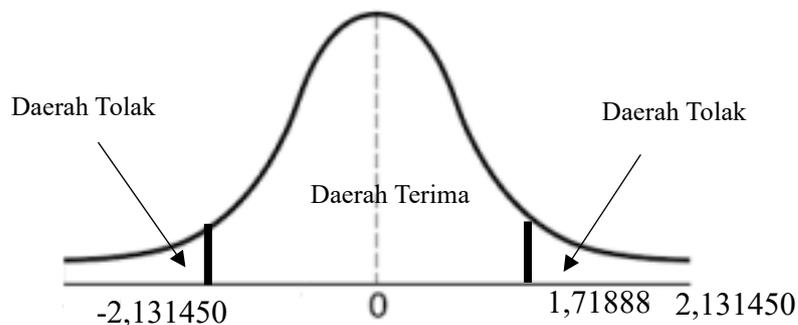
Pada variabel ini menggunakan nilai α 5% dan memiliki nilai *t-statistic* -3,752736 dengan nilai *t-tabel* 2,131450. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan artinya Upah Minimum di Provinsi Aceh berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Dapat dilihat juga melalui distribusi kurva normal t berikut.



Gambar 4.4 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel UMP

d. Inflasi di Provinsi Aceh

Pada variabel ini menggunakan nilai α 5% dan memiliki nilai *t-statistic* 1,71888 dengan nilai *t-tabel* 2,131450. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan artinya Inflasi di Provinsi Aceh berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Dapat dilihat juga melalui distribusi kurva normal t berikut.



Gambar 4.5 Kurva Distribusi Normal Uji t Variabel INF

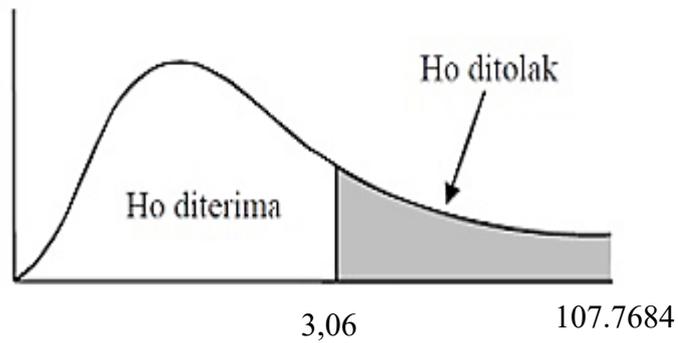
2. Uji Simultan (Uji F)

Uji-F statistik dilakukan untuk menguji signifikan semua variabel independen secara bersamaan terhadap nilai variabel dependen. Pada penelitian ini memiliki hipotesis seperti berikut:

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ (Jumlah Penduduk, Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh, dan Inflasi di Provinsi Aceh tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh).

$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$ Jumlah Penduduk, Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh, dan Inflasi di Provinsi Aceh berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh).

Hasil regresi setelah melakukan logaritma natural tersebut memiliki nilai Prob. *F-Statistic* sebesar 0.000000. Kemudian nilai *F-statistic* 107.7684. Dengan nilai $\alpha = 5\%$, maka Prob. *F-Statistic* < nilai α , maka Jumlah Penduduk (JP), Pengangguran di Provinsi Aceh (PG), Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP), dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Dapat dilihat juga melalui distribusi kurva f dengan nilai f tabel sebesar 3,06. Dengan demikian maka H_0 ditolak yang artinya bahwa variabel Jumlah Penduduk (JP), Pengangguran di Provinsi Aceh (PG), Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP), dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (TK).

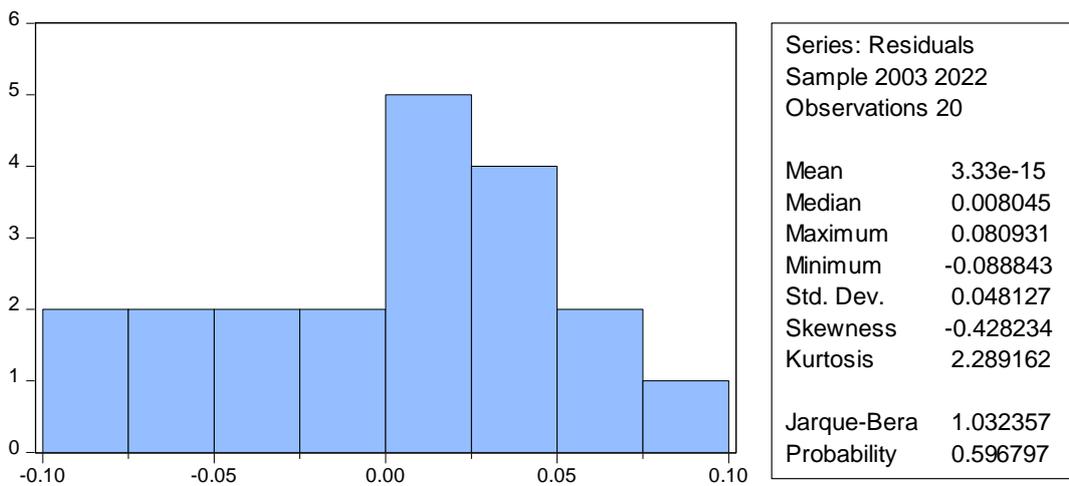


Gambar 4.6 Kurva Distribusi Uji f Pada Model Regresi

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Tabel 4.10 Uji Normalitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)



Sumber: Eviews 10 dan diolah

Dari grafik diatas dapat dilihat hasil uji normalitas, untu melihat data berdistribusi normal atau tidak, maka dapat dilihat dari nilai Probabilitas dengan α 5%. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat dilihat bahwa residual distribusi bersifat normal. Dari tabel uji normalitas diatas diketahui nilai probabilitas $0,596797 > 0,05$ artinya data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Variance Inflation Factors
Date: 08/25/23 Time: 07:21
Sample: 2003 2022
Included observations: 20

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	44.89341	306040.1	NA
LN_JP	0.241677	389098.0	6.150510
LN_PG	0.009112	282.1830	2.931636
LN_UMP	0.005537	7620.695	3.163611
LN_INF	0.000207	4.371233	1.401715

Sumber: Eviews 10 dan diolah

Pada tabel 4.5 diatas terlihat bahwa uji multikolinearitas setelah dilakukan logaritma natural (ln) menunjukkan bahwa nilai VIF variabel Jumlah Penduduk (JP), Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh dan Inflasi di Provinsi (INF) memiliki nilai *Centered* VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) yang berarti hasil regresi tersebut masih tidak terjadi multikolinearitas dan tidak perlu diuji kembali.

3. Uji Heteroskedastisitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.584261	Prob. F(4, 15)	0.6789
Obs*R-squared	2.696011	Prob. Chi-Square(4)	0.0669
Scaled explained SS	0.977512	Prob. Chi-Square(4)	0.9132

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/25/23 Time: 07:22

Sample: 2003 2022
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.372299	0.331933	1.121608	0.2797
LN_JP	-0.027876	0.024354	-1.144586	0.2703
LN_PG	-0.000747	0.004729	-0.158026	0.8765
LN_UMP	0.004181	0.003686	1.134171	0.2745
LN_INF	0.000353	0.000712	0.496428	0.6268
R-squared	0.134801	Mean dependent var		0.002200
Adjusted R-squared	-0.095919	S.D. dependent var		0.002563
S.E. of regression	0.002683	Akaike info criterion		-8.791186
Sum squared resid	0.000108	Schwarz criterion		-8.542253
Log likelihood	92.91186	Hannan-Quinn criter.		-8.742592
F-statistic	0.584261	Durbin-Watson stat		1.663236
Prob(F-statistic)	0.678867			

Sumber: Eviews 10 dan diolah

Berdasarkan hasil dari Uji Heteroskedastisitas setelah dilakukan logaritma natural di atas, dapat dilihat bahwa nilai *p-value* atau nilai *prob. Chi Square(4)* pada *Obs*R-Squared* sebesar 0.0669. Hal ini berarti nilai *p-value* $0.0669 < 5\%$, 10% dan 15% yang berarti model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji terakhir yaitu uji autokorelasi setelah dilakukan logaritma natural (ln) sebagai berikut.

4. Uji Autokorelasi Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	6.278517	Prob. F(2,13)	0.0124
Obs*R-squared	9.826675	Prob. Chi-Square(2)	0.0073

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/25/23 Time: 07:26

Sample: 2003 2022

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.616541	6.133283	-0.752703	0.4650
LN_JP	0.304063	0.442204	0.687607	0.5038
LN_PG	0.160330	0.099383	1.613252	0.1307
LN_UMP	-0.025415	0.061590	-0.412651	0.6866
LN_INF	-0.024970	0.013422	-1.860379	0.0856
RESID(-1)	0.839092	0.270049	3.107189	0.0083
RESID(-2)	0.161232	0.332866	0.484376	0.6362
R-squared	0.491334	Mean dependent var		3.33E-15
Adjusted R-squared	0.256565	S.D. dependent var		0.048127
S.E. of regression	0.041496	Akaike info criterion		-3.257216
Sum squared resid	0.022385	Schwarz criterion		-2.908710
Log likelihood	39.57216	Hannan-Quinn criter.		-3.189184
F-statistic	2.092839	Durbin-Watson stat		2.522169
Prob(F-statistic)	0.124506			

Sumber: Eviews 10 dan diolah

Pada hasil uji autokorelasi setelah dilakukan logaritma natural (ln) di atas, dapat dilihat dengan nilai *Durbin-Watson statnya*. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 2.522169 yang artinya bahwa hasil regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dengan melakukan logaritma natural (ln), maka tidak terjadi lagi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, artinya bahwa hasil regresi linier berganda Tingkat Kemiskinan setelah dilakukan logaritma natural (ln) dapat dikatakan lolos dari uji asumsi klasik.

4.2.2 Interpretasi Model Regresi

Hasil regresi pada model Tingkat Kemiskinan (TK) maka bentuk modelnya adalah sebagai berikut:

$$TK_t = \alpha_0 + \alpha_1 JP_t + \alpha_2 PG_t + \alpha_3 UMP_t + \alpha_4 INF_t + \varepsilon_t$$

Hasil interpretasi dari model di atas adalah sebagai berikut:

$$TK_t = 22,99768 + 1,010470 + (-0,160981) + (-0,279243) + 0,024706$$

- Konstanta $\alpha_0 = 22,99768$ ini memiliki arti jika Jumlah Penduduk (JP), Pengangguran di Provinsi Aceh (PG) Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) memiliki nilai 0, maka Tingkat Kemiskinan (TK) akan sebesar 22,99768 ribu jiwa pada tahun t. Pada hasil estimasi regresi model, variabel-variabel yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (TK) memiliki nilai konstanta sebesar 22,99768 yang memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan (TK) memiliki kecenderungan turun ketika Jumlah Penduduk, Pengangguran di Provinsi Aceh, Upah Minimum di Provinsi Aceh dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) bernilai tetap.
- Koefisien $\alpha_1 = 1,01047$, artinya jika Pengangguran di Provinsi Aceh (PG) Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) tetap, maka setiap peningkatan Jumlah Penduduk (JP) sebesar 1 ribu jiwa akan meningkatkan Tingkat Kemiskinan sebesar 1.010,47 ribu jiwa. Berdasarkan hasil regresi setelah melakukan logaritma natural (ln) nilai koefisien Jumlah Penduduk (JP) sebesar 1,01047 dan memiliki nilai probabilitas yang signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (TK). Nilai probabilitasnya adalah sebesar 0.0577. Hal ini membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel JP terhadap variabel TK. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Rozaan Almira & Huda, 2022) menghasilkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2006 hingga 2020. Pada penelitian ini juga data

membuktikan jumlah penduduk adanya hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

- Koefisien $\alpha_2 = -0,160981$, jika Jumlah Penduduk (JP), Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) tetap, maka setiap penurunan Jumlah Pengangguran di Provinsi Aceh (PG) sebesar 1 ribu jiwa maka akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 160,981 ribu jiwa. Berdasarkan hasil regresi setelah melakukan logaritma natural (ln) nilai koefisien Jumlah Pengangguran di Provinsi Aceh (PG) sebesar -0,160981 dan memiliki nilai probabilitas yang signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (TK). Nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,1124. Hal ini membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel PG terhadap variabel TK. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Mardiatillah et al., n.d.), menghasilkan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2015-2019. Pada penelitian ini juga, data membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
- Koefisien $\alpha_3 = -0,279243$, jika Jumlah Penduduk (JP), Jumlah Pengangguran di Provinsi Aceh (PG) dan Inflasi di Provinsi Aceh (INF) tetap, maka setiap peningkatan Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) sebesar 100 ribu rupiah akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 27.924,3 ribu jiwa. Berdasarkan hasil regresi setelah melakukan logaritma natural (ln) nilai koefisien Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) sebesar -0,279243 dan memiliki nilai probabilitas yang signifikan terhadap

variabel Tingkat Kemiskinan (TK). Nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0019. Hal ini membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel UMP terhadap variabel TK. Dari penelitian yang dilakukan (Yulita Sutikno et al., 2019), menyimpulkan bahwa Upah Minimum Provinsi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Pada penelitian ini juga membuktikan upah minimum provinsi adanya hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

- Koefisien $\alpha_4 = 0,024706$, jika Jumlah Penduduk (JP), Jumlah Pengangguran di Provinsi Aceh (PG) dan Upah Minimum di Provinsi Aceh (UMP) tetap, maka setiap peningkatan Inflasi di Provinsi (INF) sebesar 100% akan meningkatkan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,4706 ribu jiwa. Berdasarkan hasil regresi setelah melakukan logaritma natural (ln) nilai koefisien Inflasi di Provinsi (INF) sebesar 0,024706 dan memiliki nilai probabilitas yang signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (TK). Nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,1062. Hal ini membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel INF terhadap variabel TK. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Mardiatillah et al., n.d.), menghasilkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan, karena inflasi mempengaruhi harga-harga secara umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis deskriptif mengenai indikator kemiskinan di Provinsi Aceh dalam hal ini persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan berdasarkan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh tahun 2003-2022. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami tren berfluktuasi yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun-tahun tertentu. Dan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami tren penurunan berdasarkan nilai indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2003-2022.
2. Variabel jumlah penduduk, pengangguran, upah minimum provinsi dan inflasi secara bersama-sama berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Hasil estimasi model pertama yaitu pengaruh jumlah penduduk (JP), pengangguran (PG), upah minimum provinsi (UMP), dan inflasi (INF) terhadap tingkat kemiskinan (TK) sebesar 86,63%, Sedangkan 13,37% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan - kebijakan untuk mengetasi kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis, diharapkan menggunakan data terbaru dan menambah variabel penelitian lain untuk mendapatkan pengetahuan baru yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Aprillyana, N. (2020). ESTIMASI INDIKATOR KEMISKINAN TINGKAT KECAMATAN MENGGUNAKAN REGRESI KEKAR M-KUANTIL. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(2), 1–17. <http://journal.sragenkab.go.id>,
- Aprilsesa Dian, T., Tahir, M., Aminah, S., & Marnita. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah pada Buruh Dibawah Upah Minimum. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 Number 1.
- Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: cetakan BPFE
- Febriaty, H., & Nurwani. (2018). Pengaruh pendapatan perkapita, investasi dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*.
- Jalil, A., & Kasnelly, S. (2019). MENINGKATNYA ANGKA PENGANGGURAN DITENGAH PENDEMI (COVID-19). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.
- Jhingan, M 2016. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasim, R., Engka, D., Siwu, H., Pengaruh Inflasi, A., Dan Belanja Pemerintah, P., Kasim, R., Engka, D. S., Dj Siwu, H., Ekonomi Pembangunan, J., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2021). *ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFLATION, UNEMPLOYMENT AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON POVERTY IN MANADO CITY*. 9, 953–963.
- Kelesaran P, R., Naukoko T, A., & Mandej, D. (2022). *ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN 15 KABUPATENKOTA DI PROVINSI SULAW*.
- Khoirunnisa, H. (2023). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2021*.
- Lavenia, lulut, Mandai, S., & Muhammad Yudhi Lutfi. (2023). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), UPAH

MINIMUM, PENGANGGURAN, JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA MELEK HURUF TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 - 2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 319–328. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>

Lintang Parameswari, Program, E., Ekonomi, S. I., Pembangunan, S., & Oleh, D. (2015). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 1995-2013 PUBLIKASI NASKAH ILMIAH* Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh.

Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Mardiatillah, R., Panorama, M., Sumantri, R., & Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, F. (n.d.). *Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2015-2019*. 18(2), 2021–2279. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>

Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi / Michael P. Todaro. Stephen C. Smith* (11th ed.).

Mila Ningrum, A., Lisa, A., & Desmawan, D. (2022). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI DKI JAKARTA*. In *Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 1, Issue 4). Jurnal Manajemen.

Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). *Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia* (Vol. 2, Issue 1).

Rahayu, S. E., Pohan, M., Febrianty, H., & Efendy Nst, A. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Perdana Publishing.

Rapidah. (2019). *PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN LABUHANBATU*.

Rena Armita, S., & Rr Retno Sugiharti. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. 5.

- Rivai Veithzal, H. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik* (Raja Grafindo Persada, Ed.).
- Rozaan Almira, S., & Huda, S. (2022). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. In *Jurnal Randai* (Vol. 35, Issue 1).
- Safina Hasibuan, L., & Lestari, R. (n.d.). *ANALISIS POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SIMALUNGUN*.
- Safina Hasibuan, L., & Lestari, R. (n.d.). *ANALISIS POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SIMALUNGUN*.
- Setiawan Prihatino, P. E. (2020). *Analisis pengaruh perubahan harga komoditas kopi dan perubahan valuta asing terhadap return saham perusahaan kopi yang go public pada tahun 2014-2019*.
- Silastri, N. (2017). The Influence Of Sum Of Citizens and Gross Regional Domestic Income Toward Poverty In Kuantan Singingi Regency. In *JOM Fekon* (Vol. 4, Issue 1).
- Syarifuddin, & Mulda, R. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN GALANG BARU KOTA BATAM. *Jurnal Trias Politika*.
- Todaro, P. Michael 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta: jl. H. Baping Raya No.100
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003*. (n.d.).
- Yulita Sutikno, R., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, steeva Y. L. (2019). PENGARUH UPAH MINIMUM DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19.

LAMPIRAN

A. Data Regresi Linier Berganda (Diolah)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2003	1.254,2	29,76
2004	1.157,2	28,47
2005	1.166,4	28,69
2006	1.149,7	28,28
2007	1.083,7	26,65
2008	962,3	23,55
2009	885,8	21,61
2010	898,4	19,95
2011	900,2	19,48
2012	880,5	18,58
2013	856,9	17,72
2014	837,4	16,98
2015	851,6	17,08
2016	848,44	16,73
2017	872,61	16,89
2018	839,49	15,97
2019	819,44	15,32
2020	814,91	14,99
2021	834,24	15,33
2022	806,82	14,64

Jumlah Peduduk di Provinsi Aceh Tahun 2003-202

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)
2003	4.218,486
2004	4.075,599
2005	4.031,589
2006	4.153,573
2007	4.223,833
2008	4.293,915
2009	4.363,477
2010	4.523,144

2011	4.619,033
2012	4.715,108
2013	4.811,133
2014	4.906,835
2015	5.001,953
2016	5.096,248
2017	5.189,466
2018	5.281,314
2019	5.371,532
2020	5.274,871
2021	5.333,733
2022	5.407,855

Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	Pengangguran (Persen)
2003	8,97
2004	9,35
2005	14,00
2006	10,43
2007	9,84
2008	9,56
2009	8,71
2010	8,37
2011	7,43
2012	9,10
2013	10,30
2014	9,02
2015	9,93
2016	7,57
2017	6,57
2018	6,34
2019	6,17
2020	6,59
2021	6,30
2022	6,17

Upah Minimum Provinsi di Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	UMP
--------------	------------

2003	425.000
2004	550.000
2005	620.000
2006	820.000
2007	850.000
2008	1.000.000
2009	1.200.000
2010	1.300.000
2011	1.350.000
2012	1.400.000
2013	1.550.000
2014	1.750.000
2015	1.900.000
2016	2.118.500
2017	2.500.000
2018	2.700.000
2019	2.916.810
2020	3.165.031
2021	3.165.031
2022	3.166.460

inflasi di Provinsi Aceh Tahun 2003-2022

Tahun	Inflasi
2003	4.03
2004	7.08

2005	34.88
2006	9.98
2007	9.41
2008	11.92
2009	3.72
2010	5.86
2011	3,43
2012	0.22
2013	7.31
2014	8.09
2015	1.53
2016	3.95
2017	4.25
2018	1.84
2019	1.69
2020	3.59
2021	2.24
2022	5.89

B. Hasil Regresi Linier Berganda Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Dependent Variable: TK
 Method: Least Squares
 Date: 08/25/23 Time: 07:03
 Sample: 2003 2022
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	98.77778	23.21902	4.254176	0.0007
JP	-1.39E-05	6.17E-06	-2.255021	0.0395
PG	-0.883531	0.809781	-1.091073	0.2925
UMP	-5.62E-07	3.43E-06	-0.163700	0.8722
INF	0.174992	0.167965	1.041836	0.3140
R-squared	0.882093	Mean dependent var		25.37000
Adjusted R-squared	0.850651	S.D. dependent var		7.052823
S.E. of regression	2.725612	Akaike info criterion		5.055581
Sum squared resid	111.4344	Schwarz criterion		5.304514
Log likelihood	-45.55581	Hannan-Quinn criter.		5.104175
F-statistic	28.05472	Durbin-Watson stat		0.507321
Prob(F-statistic)	0.000001			

C. Hasil Regresi Linier Berganda Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Dependent Variable: LN_TK
 Method: Least Squares
 Date: 08/25/23 Time: 07:05
 Sample: 2003 2022
 Included observations: 20

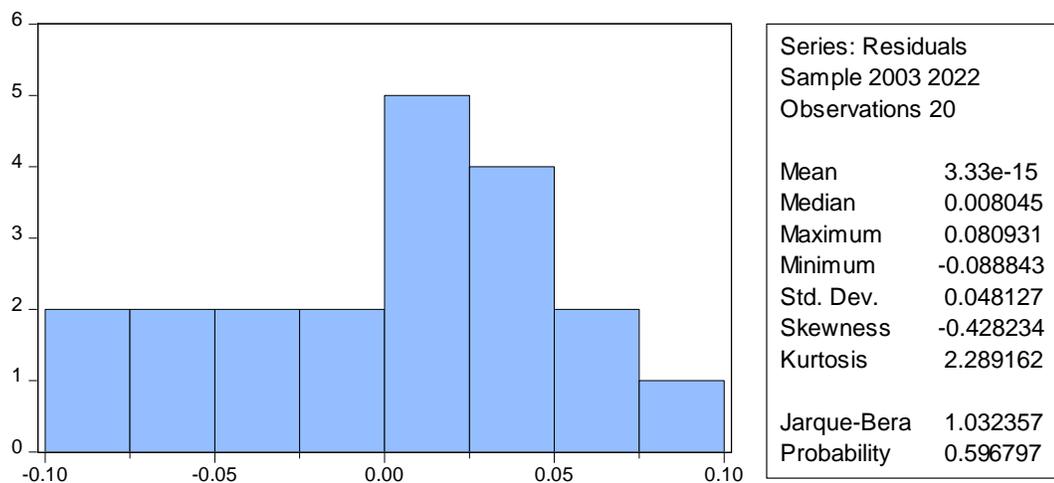
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.99768	6.700254	3.432360	0.0037
LN_JP	1.010470	0.491607	-2.055443	0.0577
LN_PG	-0.160981	0.095455	-1.686454	0.1124
LN_UMP	-0.279243	0.074411	-3.752736	0.0019
LN_INF	0.024706	0.014373	1.718888	0.1062

R-squared	0.866373	Mean dependent var	3.199558
Adjusted R-squared	0.857406	S.D. dependent var	0.262448
S.E. of regression	0.054165	Akaike info criterion	-2.781253
Sum squared resid	0.044007	Schwarz criterion	-2.532320
Log likelihood	32.81253	Hannan-Quinn criter.	-2.732659
F-statistic	107.7684	Durbin-Watson stat	0.892789
Prob(F-statistic)	0.000000		

D. Korelasi Antar Variabel Independen

	JP	PG	UMP	INF
JP	1.000000	-0.779448	0.967994	-0.538621
PG	-0.779448	1.000000	-0.783188	0.764058
UMP	0.967994	-0.783188	1.000000	-0.450237
INF	-0.538621	0.764058	-0.450237	1.000000

E. Uji Normalitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)



F. Uji Multikolinearitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Variance Inflation Factors
 Date: 08/25/23 Time: 07:21
 Sample: 2003 2022
 Included observations: 20

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	44.89341	306040.1	NA
LN_JP	0.241677	389098.0	6.150510
LN_PG	0.009112	282.1830	2.931636
LN_UMP	0.005537	7620.695	3.163611
LN_INF	0.000207	4.371233	1.401715

G. Uji Heteroskedastisitas Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.584261	Prob. F(4,15)	0.6789
Obs*R-squared	2.696011	Prob. Chi-Square(4)	0.0669
Scaled explained SS	0.977512	Prob. Chi-Square(4)	0.9132

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 08/25/23 Time: 07:22
 Sample: 2003 2022
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.372299	0.331933	1.121608	0.2797
LN_JP	-0.027876	0.024354	-1.144586	0.2703
LN_PG	-0.000747	0.004729	-0.158026	0.8765
LN_UMP	0.004181	0.003686	1.134171	0.2745
LN_INF	0.000353	0.000712	0.496428	0.6268
R-squared	0.134801	Mean dependent var		0.002200
Adjusted R-squared	-0.095919	S.D. dependent var		0.002563
S.E. of regression	0.002683	Akaike info criterion		-8.791186
Sum squared resid	0.000108	Schwarz criterion		-8.542253
Log likelihood	92.91186	Hannan-Quinn criter.		-8.742592
F-statistic	0.584261	Durbin-Watson stat		1.663236
Prob(F-statistic)	0.678867			

H. Uji Autokorelasi Setelah dilakukan Logaritma Natural (LN)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	6.278517	Prob. F(2,13)	0.0124
Obs*R-squared	9.826675	Prob. Chi-Square(2)	0.0073

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/25/23 Time: 07:26

Sample: 2003 2022

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.616541	6.133283	-0.752703	0.4650
LN_JP	0.304063	0.442204	0.687607	0.5038
LN_PG	0.160330	0.099383	1.613252	0.1307
LN_UMP	-0.025415	0.061590	-0.412651	0.6866
LN_INF	-0.024970	0.013422	-1.860379	0.0856
RESID(-1)	0.839092	0.270049	3.107189	0.0083
RESID(-2)	0.161232	0.332866	0.484376	0.6362

R-squared	0.491334	Mean dependent var	3.33E-15
Adjusted R-squared	0.256565	S.D. dependent var	0.048127
S.E. of regression	0.041496	Akaike info criterion	-3.257216
Sum squared resid	0.022385	Schwarz criterion	-2.908710
Log likelihood	39.57216	Hannan-Quinn criter.	-3.189184
F-statistic	2.092839	Durbin-Watson stat	2.522169
Prob(F-statistic)	0.124506		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Mhd. Rizky Syahputra
NPM : 1905180052
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 16 April 2002
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara
Alamat : Jl. Durung No.80
No. Telepon : 0895391809889
Email : riskysyahputra2002@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M Idham Parinduri S.E
Nama Ibu : Rosdeni Lubis
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Durung

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Al-Hidayah Terpadu Medan
2. SMP Negeri 17 Medan
3. SMA Negeri 3 Medan
4. Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi
Pembangunan (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Kamis, 20 Juli 2023 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Mhd. Rizky Syahputra
N.P.M. : 1905180052
Tempat / Tgl.Lahir :
Alamat Rumah : Jalan Durung No. 80
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	Perambahan data menjadi 20 Tahun (2003-2022)
Bab II
Bab III	Perubahan usi pada teknik analisis data
Lainnya
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Kamis, 20 Juli 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

Sri Endang Rahayu, SE, M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra. Roswita Hafni, M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 20 Juli 2023** menerangkan bahwa:

Nama : Mhd. Rizky Syahputra
N.P.M. : 1905180052
Tempat / Tgl.Lahir :
Alamat Rumah : Jalan Durung No. 80
JudulProposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : **Sri Endang Rahayu, SE, M.Si**

Medan, Kamis, 20 Juli 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Sri Endang Rahayu, SE, M.Si

Pemanding

Dra. Roswita Hafni, M.Si

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2847/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/9/1/2023

Kepada Yth.

Medan, 9/1/2023

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mhd. Rizky Syahputra
NPM : 1905180052
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : ANALIS KEUANGAN DAN PERBANKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di batubara
2. faktor-faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Tanjung Balai dan bagaimana infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Tanjung Balai
3. seberapa jauh pembangunan desa telah dicapai di kabupaten Deli Serdang dalam periode waktu tertentu dan bagaimana kondisi pembangunan desa telah berkembang dari waktu ke waktu.

Rencana Judul : 1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten
2. Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IpD) Dan Indeks Desa Membangun (Idm) Di Kabupaten

Objek/Lokasi Penelitian : 1. Kabupaten Batu Bara 2. Tanjung Balai 3. Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Mhd. Rizky Syahputra)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2847/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/9/1/2023

Nama Mahasiswa : Mhd. Rizky Syahputra
NPM : 1905180052
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : ANALIS KEUANGAN DAN PERBANKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 9/1/2023
Nama Dosen Pembimbing*) : Sri Endang Rahayu, SE, M.Si
Judul Disetujui**) : Analisis Faktor - Faktor yang mempengaruhi
Tingkat kemiskinan Di Provinsi Aceh

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Sri Endang Rahayu, SE, M.Si)

Keterangan:

*) Dituai oleh Pimpinan Program Studi

**) Dituai oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGELOMPOKAN PEMIMPINAN PESAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred-PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2587 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2023

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : 09/01/2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Mhd. Rizky Syahputra**
N P M : **1905180052**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Manajemen**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh**

Dosen Pembimbing : **Sri Endang Rahayu, SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 13 September 2023**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Safar 1445 H
13 September 2023 M



Dekan

Dr. H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1 Peringgal

